



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN AKHIR TAHUN 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**2018
T A H U N**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Laporan Akhir Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan akhir tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan gambaran kondisi realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja, capaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, kiranya laporan ini menjadi dasar serta motivasi untuk meningkatkan kinerja para ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tanjung Selor, 04 Januari 2019
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,



MUHAMAD ISHAK, SE., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640823 198601 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah .	2
B. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah	4
C. Sarana dan Prasarana	8
D. Program dan Kerja Anggaran	10
BAB III. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12
A. Realisasi Program dan Kegiatan	12
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.....	13
3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	13
4. Program Pendidikan Kedinasan	14
4.1 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan	14
4.2 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan	16
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	17
5.1 Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS	17
5.2 Seleksi Penerimaan Calon ASN	23
5.3 Penempatan PNS.....	25
I. Pengukuhan/Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	25
II. Pengalihan Personil Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014	29
III. Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu... ..	29
IV. Mutasi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Tahun 2018.....	30
5.4 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Ijin Belajar	32
5.5 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi.....	33
5.6 Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.....	34
5.7 Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah	35
5.8 Ujian Penyesuaian Ijazah	36
5.9 Pembinaan dan Evaluasi SKP.....	37
5.10 Pengambilan Sumpah Janji PNS.....	39
5.11 Ujian Dinas	40

6.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	41
6.1	Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG	41
1.	Pembentukan Tim Lintas Sektoral	42
2.	Sosialisasi E-Kerja.....	43
3.	Sosialisasi siDetektif ASN (eHukdis).....	44
4.	Rekonsiliasi Data dan Evaluasi SIMPEG	45
6.2	Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	46
6.3	Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU).....	49
6.4	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	50
6.5	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi..	50
6.6	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	53
6.7	Rapat Kerja Kepegawaian	54
7.	Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI.	55
7.1	Pelaksanaan STQ ASN Tingkat Nasional	55
7.2	Pelaksanaan Rapat Kerja KORPRI	57
7.3	Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI.....	57
8.	Kegiatan Lain-Lain	58
8.1	Penyerahan SK CPNS Oleh MENPAN-RB	58
8.2	Kunjungan Kerja BKD Prov. Jawa Barat.....	58
8.3	Peringatan HUT KORPRI Ke 47 Tahun 2018	59
B.	Capaian Program dan Kegiatan	60
C.	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.....	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan	5
Tabel 2.2 Data ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	6
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah	8
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah	9
Tabel 2.5 Program dan Kerja Anggaran.....	10
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran APBD Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah	10
Tabel 3.1 Jumlah Praja IPDN Asal Pendaftaran Kalimantan Utara Tahun 2018	14
Tabel 3.2 Jumlah Praja IPDN Asal Pendaftaran Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan regional atau lokasi pendidikan.....	15
Tabel 3.3 Jumlah Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus Pendaftaran Tahun 2018 berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Utara	16
Tabel 3.4 Jumlah Peserta yang mengikuti tahapan Seleksi Terbuka	17
Tabel 3.5 Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Tahun 2018	18
Tabel 3.6 Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Bappedan dan Litbang dan Kepala Biro Pembangunan) Tahun 2018	19
Tabel 3.7 Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Tahun 2018	21
Tabel 3.8 Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2018	23
Tabel 3.9 Rincian Jumlah Peserta Per Tahapan Seleksi	24
Tabel 3.10 Jumlah Pejabat yang dilantik	25
Tabel 3.11 Jumlah Pejabat yang dilantik	27
Tabel 3.12 Jumlah Pejabat yang dilantik	28
Tabel 3.13 Jumlah Pengalihan Personil Tahun 2018	29
Tabel 3.14 Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional.....	29
Tabel 3.15 Jumlah Persetujuan Pindah Instansi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi.....	31
Tabel 3.16 Jumlah Persetujuan Pindah Instansi Mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.....	31
Tabel 3.17 Jumlah Peserta Tugas Belajar Tahun 2018	32
Tabel 3.18 Jumlah Peserta Ijin Belajar Tahun 2018.....	32
Tabel 3.19 Jumlah Penerima Satya Lencana Tahun 2018.....	33
Tabel 3.20 Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran Disiplin PNS	34
Tabel 3.21 Jumlah Peserta Ujian Penyesuaian Ijasah	36
Tabel 3.22 Jadwal Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SKP Tahun 2018.....	37
Tabel 3.23 Jumlah Peserta Ujian Dinas	40
Tabel 3.24 Daftar Materi Beserta Narasumber Kegiatan SAPK	47
Tabel 3.25 Jumlah Peserta Kegiatan SAPK Tahun 2018.....	47
Tabel 3.26 Jumlah Usulan KARIS, KARSU dan KARPEG Tahun 2018	49
Tabel 3.27 Jumlah PNS yang pensiun berdasarkan jenjang pensiun Tahun 2018	50
Tabel 3.28 Implementasi SIAO dan E-Kerja Tahun 2018.....	51
Tabel 3.29 Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2018	53

Tabel 3.30 Capaian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Keppegawaian Daerah Tahun 2018	60
Tabel 3.31 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah	3
Gambar 3.1 Gubernur Kaltara saat membuka acara Sosialisasi	13
Gambar 3.2 Narasumber dari BKN saat memberikan Materi	13
Gambar 3.3 Saat melaksanakan monitoring Praja IPDN.....	15
Gambar 3.4 Peserta saat persiapan Tes Kesehatan di RSUD Angkatan Laut di Tarakan.....	16
Gambar 3.5 Peserta saat mengikuti tes Psikologi di Hotel Pangeran Khar ...	16
Gambar 3.6 Tim Pansel saat Rapat Persiapan Seleksi Terbuka JPT Madya	19
Gambar 3.7 Berfoto bersama peserta Uji Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara	19
Gambar 3.8 Para Peserta Asessment JPT Pratama melakukan foto bersama dengan tim Asesor.....	21
Gambar 3.9 Tim Pansel melakukan rapat persiapan Seleksi Terbuka JPT Pratama	21
Gambar 3.10 Tim Pansel <i>Job Fit</i> saat melaksanakan rapat hasil <i>Job Fit</i>	22
Gambar 3.11 Salah satu peserta <i>Job Fit</i> sedang melakukan uji Presentasi	22
Gambar 3.12 Peserta Formasi Guru saat sedang melakukan pendaftaran ..	24
Gambar 3.13 Peserta Formasi Umum saat sedang melakukan pendaftaran	24
Gambar 3.14 Gubernur Kaltara saat mengunjungi LAB CAT pada saat pelaksanaan SKD	24
Gambar 3.15 Peserta saat melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan pin sesi	24
Gambar 3.16 <i>Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 Januari 2018</i>	25
Gambar 3.17 <i>Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 28 Februari 2018</i>	26
Gambar 3.18 <i>Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara</i>	27
Gambar 3.19 <i>Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas</i>	27
Gambar 3.20 <i>Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 1 Oktober 2018</i>	28
Gambar 3.21 Rapat Penentuan Peserta Ijin Belajar.....	32
Gambar 3.22 Spanduk Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Donor Darah.....	35
Gambar 3.23 Suasana Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Donor Darah.....	35
Gambar 3.24 Peserta saat mengikuti Tes CAT	36
Gambar 3.25 Peserta saat mengikuti Tes Wawancara	36
Gambar 3.26 Monitoring dan Evaluasi Cabang Dinas di Kota Tarakan.....	39
Gambar 3.27 Monitoring dan Evaluasi di Nunukan	39
Gambar 3.28 Gubernur Kaltara saat menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji kepada Perwakilan.....	39
Gambar 3.29 Peserta saat melakukan tes wawancara Ujian Dinas	40
Gambar 3.30 Pj. Sekda dan Kepala BKD saat memberikan pengarahan sebelum tes CAT dimulai.....	40
Gambar 3.31 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (electronic management ASN).....	42
Gambar 3.32 Sosialisasi di Dinas Kesehatan Prov. Kaltara	44
Gambar 3.33 Sosialisasi di BPPD Prov. Kaltara	44

Gambar 3.34 Sosialisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltara	44
Gambar 3.35 Sosialisasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara	44
Gambar 3.36 Sosialisasi e-Kinerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi se Provinsi Kalimantan Utara	44
Gambar 3.37 Sosialisasi si Detektif ASN di Tarakan.....	45
Gambar 3.38 Acara Rekonsiliasi Data dan Evaluasi SIMPEG di Tarakan.....	45
Gambar 3.39 Saat Pemindahan Server SIMPEG di Jakarta	46
Gambar 3.40 Berfoto bersama Kepala BKN dan narasumber saat acara BIMTEK SAPK di BKN Jakarta.....	48
Gambar 3.41 Pembukaan Acara Pelayanan Penerbitan KARPEG, KARIS DAN KARSU PNS	49
Gambar 3.42 Verifikasi Berkas Kelengkapan Penerbitan KARPEG, KARIS dan KARSU.....	49
Gambar 3.43 Wakil Gubernur Kaltara saat memberikan Cenderamata kepada narasumber.....	55
Gambar 3.44 Kepala BKD saat menjadi narasumber Rapat Kerja Kepegawaian se-Kaltara.....	55
Gambar 3.45 Pj. Sekretaris Daerah saat memberikan arahan kepada Kafilah MTQ ASN KORPRI Kaltara	56
Gambar 3.46 Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional.....	56
Gambar 3.47 Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional.....	57
Gambar 3.48 Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional.....	57
Gambar 3.49 MENPAN-RB saat berfoto bersama dengan Gubernur dan CPN Tahun 2017	58
Gambar 3.50 MENPAN-RB saat memberikan SK CPNS secara simbolis kepada CPNS formasi Tahun 2017.....	58
Gambar 3.51 Asisten Administrasi Umum saat menyerahkan Cenderamata kepada Kepala BKD Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja Ke Pemprov. Kaltara	58
Gambar 3.52 Gubernur Kaltara saat menyerahkan secara simbolis Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Kepada Perwakilan PNS	59
Gambar 3.53 Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	59
Gambar 3.54 Gubernur Kaltara saat menandatangani Launching Sistem Informasi GTK dan Si Detektif ASN.....	59

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jabatan	4
Grafik 2.2 Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Kelamin.....	5
Grafik 2.3 Implementasi SIAO dan E-Kinerja Tahun 2018	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel Dokumentasi Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kepegawaian yang strategis agar tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggulan yang selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah dan masyarakat. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah yang juga merupakan salah satu unsur pendukung penyelenggara pemerintahan wajib menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2018 guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Laporan Akhir Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akhir Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 yaitu :

1. Menyajikan realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja, capaian program/kegiatan dan permasalahan serta rencana tindaklanjut pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya untuk pedoman penyusunan RKA BKD Tahun 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsinya:

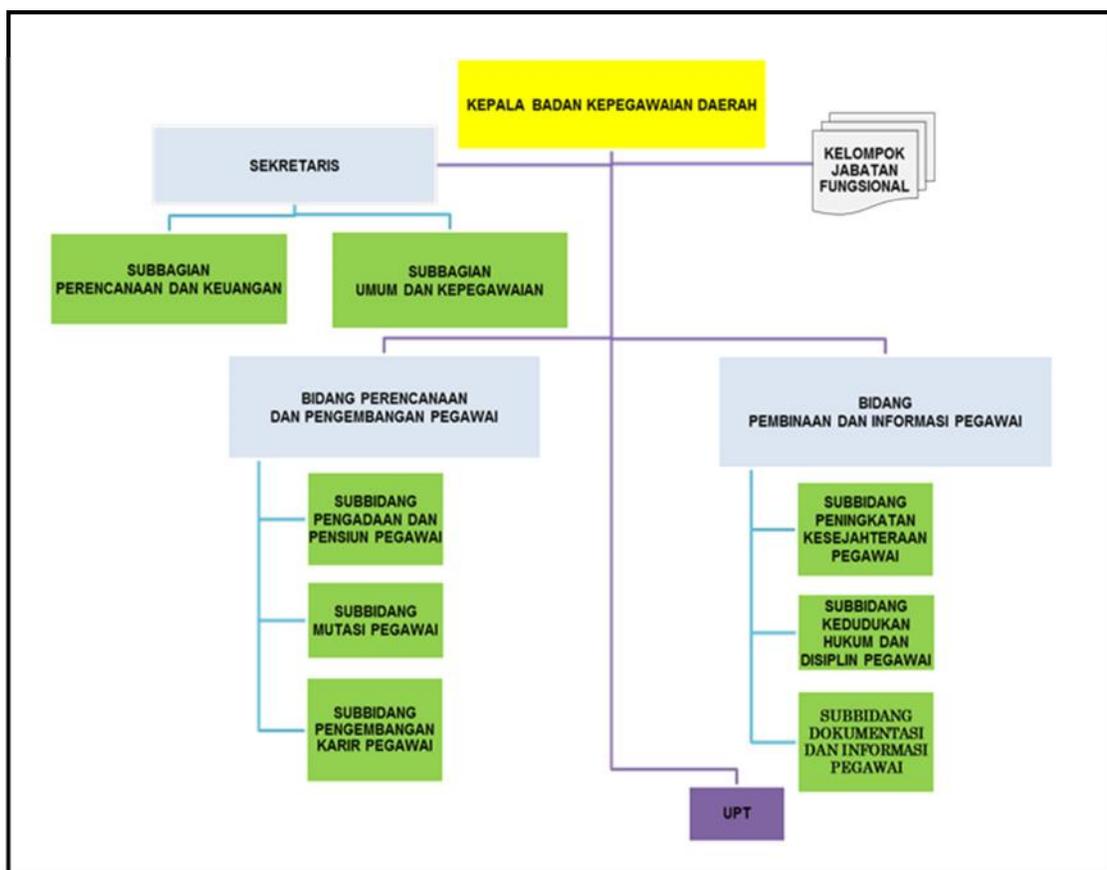
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Kepegawaian Daerah dikepalai oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
 2. Subbidang Mutasi Pegawai; dan
 3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, membawahkan :
 1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai; dan
 3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

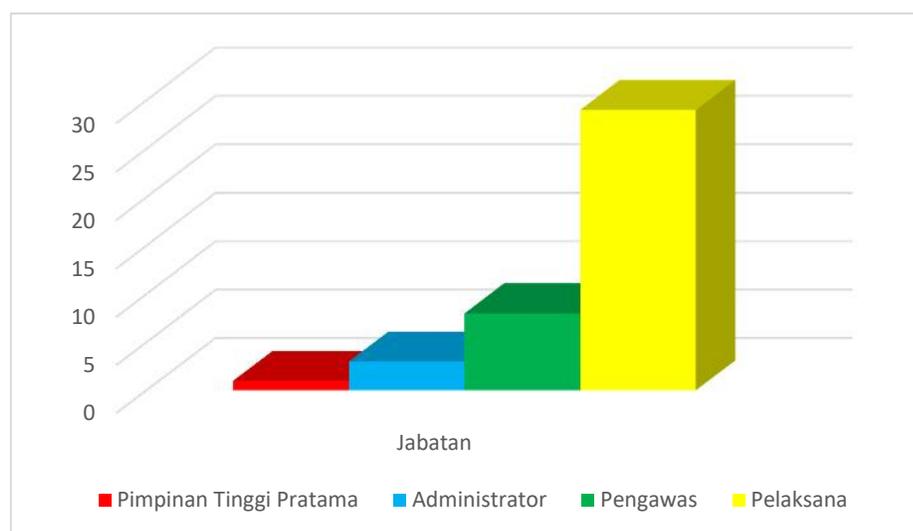
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah



B. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah

Potensi sumber daya aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan dan sarana prasarana. Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 51 orang baik yang memangku jabatan tinggi pratama, administrator, pegawai, jabatan fungsional tertentu, pelaksana dan pegawai tidak tetap sebagaimana dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jabatan



Dari grafik diatas tersebut diketahui bahwa jabatan yang terisi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yakni Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang, Administrator berjumlah 3 orang, Pegawai berjumlah 8 orang, Jabatan Fungsional Umum berjumlah 29 orang.

Berdasarkan jenis kelamin aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki yakni 54 % dengan jumlah 22 orang dan 46 % pegawai perempuan dengan jumlah 19 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.2
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Kelamin



Berdasarkan pangkat/golongan ruang dan kualifikasi tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah
Menurut Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan

NO	PANGKAT	GOL	PENDIDIKAN									JUMLAH
			S-3	S-2	S-1	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda	IV-c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pembina Tk.I	IV-b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Pembina	IV-a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4	Penata Tk. I	III-d	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Penata	III-c	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
6	Penata Muda Tk.I	III-b	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
7	Penata Muda	III-a	-	-	18	1	-	-	-	-	-	19
8	Pengatur	II-c	-	-	-	5	-	-	2	-	-	7
9	Pengatur Muda	II-a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total			0	6	26	6	0	0	3	0	0	41
Prosentase			0	15	63	15	0	0	7	0	0	100%

Sumber: Subbag Informasi dan Kepegawaian

Dari tabel 2. tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu 15% yakni 6 orang adalah berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2), 63% yakni 26 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1), sedangkan untuk tingkat pendidikan D III terdapat 15% yakni 6 orang dan SLTA sebanyak 7% yakni 3 orang, dan diketahui bahwa berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan golongan III merupakan pegawai terbanyak yaitu 30 orang, sedangkan pegawai dengan golongan II sebanyak 7 orang dan golongan tertinggi yakni golongan IV

hanya 4 orang, dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ASN dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

Tabel 2.2
Data ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	MUHAMAD ISHAK, SE., MM 196408231986011002	Pembina Utama Muda (IV/c)	KEPALA
2	BURHANUDDIN, S.Sos., M.Si. 196609051990021000	Pembina Tk. I (IV/b)	SEKRETARIS
3	WALUYA SEJATI, SE 196701071990021002	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
4	ANDI AMRIAMPA, S.Sos., M.Si. 197312202006041021	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	JUNIA CHRISTIANTI, S.Kom., M.AP. 198306182009022008	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
6	DENNY PRAYUDI, S.Sos, S.Pd, MM 198012292009021002	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI
7	DEDDY HARRYADY, S.Kom 198401272010011005	Penata (III/c)	KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
8	KHAIRUNNISA MAHARANI, S.Pd 198104142009022001	Penata (III/c)	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	NINA KARUNIA, SE 198203102010012030	Penata (III/c)	KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
10	NURLAILA, SE 197606151998022003	Penata (III/c)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
11	ANDI ERWIN, SH 197601202009011002	Penata (III/c)	KEPALA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI
12	YOS GUMELAR, S.STP 198906062010101002	Penata Muda Tk. I (III/b)	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
13	ARYA MULAWARMAN, M.M. 198706282015031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI
14	OKTARI AGIES LINDAWATI, S.IP 199210082014062002	Penata Muda Tk. I (III/b)	PENGHIMPUN DATA DAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
15	SINATRYA ANANDA, S.STP. 19940831 201609 2 001	Penata Muda (III/a)	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

16	ASTUTI .L, SE 197501012007012028	Penata Muda (III/a)	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
17	FATMAWATY SALEH, SE 197010042006042009	Penata Muda (III/a)	PENGADMINISTRASI UMUM SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
18	BAYU ADI HARTANTO, S.Kom. 199108122015031001	Penata Muda (III/a)	PRANATA KOMPUTER PERTAMA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
19	APRILIYANTI, S.Kom 199004192015032002	Penata Muda (III/a)	ANALIS DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
20	RIANITA DWIRINANTI, S.Psi. 198803222015032003	Penata Muda (III/a)	ANALIS JABATAN SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI
21	HENDRA KURNIAWAN, S.Psi. 198607082015031002	Penata Muda (III/a)	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22	ADE PRIANATA, S.Kom 198212092015031001	Penata Muda (III/a)	PRANATA KOMPUTER PERTAMA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
23	DATUK WIJAYA KUSUMA, S.STP S.STP 199310162015071003	Penata Muda (III/a)	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PEGAWAI SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
24	CANDRA KIRANA, A.Md 198302052009012002	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA DATA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI
25	EMI NORAYATI, A.Md. 198702232015032003	Pengatur (II/c)	VERIFIKATOR KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
26	EKA TRI HANDAYANI, A.Md 198604092015032004	Pengatur (II/c)	PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
27	JAUHAR LATIFAH, A.Md. 198508142015032001	Pengatur (II/c)	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
28	LISA MAYASARI 198603092008012005	Pengatur (II/c)	PENGELOLA DATA MUTASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29	ADEN 198202202009011001	Pengatur (II/c)	PENGELOLA KEPANGKATAN SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
30	NUR KOMARIAH 198306112015032001	Pengatur Muda (II/a)	PENGADMINISTRASIAN UMUM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31	BAYU SATRIYO BAMBANG SISWANDONO, S.H. 19830108 201802 1 001	III/a	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI
32	ALEX SAFRIANTO, S.E. 19851022 201802 1 001	III/a	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33	KADER GINTING, S.E. 19860814 201802 1 002	III/a	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI
34	YE CHARLES, S.E. 19860930 201802 1 001	III/a	PENYUSUN RENCANA MUTASI SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

35	WAHYU ANGGUN NUGROHO, S.E. 19880220 201802 1 001	III/a	ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
36	HADRIAN JULIANTO, S.Kom. 19880726 201802 1 001	III/a	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
37	AGUS ANGGORO KURNIAWAN, S.ST. 19880830 201802 1 001	III/a	ANALIS DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI
38	EKA RAHIL NUR INAYAH, S.Psi. 19910727 201802 2 001	III/a	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
39	DEWI CITRISI DITA SARI, S.E. 19930828 201802 2 001	III/a	ANLIS PENGELOLAAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
40	RAHMAWAN NUR B., A.Md. 19890416 201802 1 001	II/c	PEGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
41	DENY KURNIAWATI, A.Md. 19941230 201802 2 002	II/c	PENGELOLA KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sumber: Subbag Informasi dan Kepegawaian

Didalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara didukung dan dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah

No	Jabatan Non PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	2	3	5
2	Sopir	1	-	1
3	Keamanan/Penjaga Malam	4	-	4
Jumlah		7	3	10

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pelayanan publik memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, televisi, dan sarana pendukung lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Mobil	6		Baik
2	Sepeda Motor	8		Baik
3	Ac	11		Baik
4	Komputer	12		Baik
5	Camera	3		Baik
6	Laptop	12		Baik
7	Handycam	1		Baik
8	Proyektor	2		Baik
9	Finger identiti	2		Baik
10	Meja	16		Baik
11	Kursi	47		Baik
12	Filling kabinet	10		Baik
13	Lemari Arsip	4		Baik
14	Kursi Putar	20		Baik
15	Brankas	1		Baik
16	Mesin Tik	2		Baik
17	Kalkulator	5		Baik
18	Hard disk	13		Baik
19	Printer	28		Baik
20	Papan Pengumuman	2		Baik
21	Televisi	2		Baik
22	Televisi Monitor	1		Baik
23	UPS	39		Baik
24	Scanner	1		Baik
25	Tangga Alumunium	2		Baik
26	Faximile	1		Baik
27	Slide Projector	2		Baik
28	Mesin Hitung elektronik	1		Baik
29	Tikar	5 m		Baik
30	Gorden	38 m		Baik
31	Kursi Pimpinan	1		Baik
32	Lemari Penyimpanan	50		Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

D. Program dan Kerja Anggaran

Adapun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebanyak 7 Program yang terdiri dari 45 kegiatan pada anggaran murni dan 43 kegiatan pada anggaran perubahan. Alokasi anggaran murni sebesar Rp 17.613.999.373,- kemudian pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 d sebesar Rp. 18.313.999.373,- yang termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Rincian Jenis Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
	Belanja	17.613.999.373	18.313.999.373	700.000.000	3,97
	Belanja Tidak Langsung	5.488.435.434	5.488.435.434	0	0
1	Belanja Pegawai	5.488.435.434	5.488.435.434	0	0
	Belanja Langsung	12.125.563.939	12.825.563.939	700.000.000	5,77
1	Belanja Pegawai	2.266.700.000	2.741.900.000	475.200.000,00	20,96
2	Belanja Barang dan Jasa	8.975.263.939	9.082.606.139	107.342.200	1,20
3	Belanja Modal	883.600.000	1.001.057.800	117.457.800,00	13,29
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.613.999.373)	(18.313.999.373)	700.000.000	(3,97)

Sumber: Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran APBD Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah

No	Program/Kegiatan	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.452.901.000,00	2.553.230.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	26.000.000,00	21.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000,00	95.800.000,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	8.600.000,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.113.800.000,00	1.081.400.000,00
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.640.000,00	15.000.000,00
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	10.000.000,00
8	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000,00	150.000.000,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000,00	75.000.000,00
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	10.000.000,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	193.200.000,00	181.430.000,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	252.692.000,00	500.000.000,00

14	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	149.569.000,00	300.000.000,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523.338.539,00	446.262.800,00
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000,00	5.000.000,00
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.000.000,00	141.482.800,00
17	Penyewaan Rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas	268.138.539,00	209.780.000,00
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	153.200.000,00	90.000.000,00
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	-
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	-
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	292.053.000,00	275.612.739,00
21	Pendidikan dan pelatihan formal	99.053.000,00	149.182.473,00
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	193.000.000,00	126.430.266,00
D	Program Pendidikan Kedinasan	393.486.000,00	343.486.000,00
23	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	113.700.000,00	63.700.000,00
24	Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan	279.786.000,00	279.786.000,00
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6.189.374.000,00	6.675.490.000,00
25	Penyusunan Rencana Pembinaan dan pengembangan Karier	815.000.000,00	1.565.000.000,00
26	Seleksi Penerimaan Calon ASN	1.575.000.000,00	2.296.000.000,00
27	Penempatan PNS	145.900.000,00	145.900.000,00
28	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar dan izin belajar	2.350.000.000,00	1.630.500.000,00
29	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	148.440.000,00	58.840.000,00
30	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	264.940.000,00	256.740.000,00
31	Tes Kesehatan , Narkoba dan Donor Darah	97.648.000,00	39.400.000,00
32	Ujian penyesuaian ijazah	286.360.000,00	286.360.000,00
33	Pembinaan dan evaluasi SKP	220.136.000,00	132.300.000,00
34	Pengambilan sumpah janji PNS	75.800.000,00	54.300.000,00
35	Ujian Dinas	210.150.000,00	210.150.000,00
F	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.631.593.400,00	1.542.304.400,00
36	Pembangunan dan pengembangan SIMPEG	402.756.000,00	440.756.000,00
37	Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	102.800.000,00	89.600.000,00
38	Penataan sistem aplikasi Kepegawaian (SAPK)	292.620.000,00	292.620.000,00
39	Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi	316.073.400,00	400.648.400,00
40	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	71.200.000,00	100.200.000,00
41	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	113.480.000,00	113.480.000,00
42	Rapat Kerja Kepegawaian	332.664.000,00	105.000.000,00
G	Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	642.818.000,00	1.034.178.000,00
43	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ASN	436.640.000,00	773.000.000,00
44	Pelaksanaan rapat kerja KORPRI	134.538.000,00	134.538.000,00
45	Sosialisasi bantuan hukum KORPRI	71.640.000,00	126.640.000,00
	JUMLAH	12.125.563.939,00	12.870.563.939,00

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan

BAB III

EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu program pendukung penyelenggaraan pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 2.452.901.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 2.553.230.000, - yang terdiri dari 14 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 98,51 % dan rata-rata realisasi keuangan 75,29 %.

Program ini berisi 14 kegiatan rutin yang mendukung administrasi pelayanan kantor seperti penyediaan jasa surat-menyurat, pembayaran listrik air dan layanan internet, penyediaan jasa perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi,pembinaan,dan pengawasan di dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran juga merupakan salah satu program pendukung penyelenggaraan pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 523.338.539,- yang terdiri dari 5 kegiatan dan anggaran perubahan sebesar Rp. 446.262.800 ,-. yang terdiri dari 3 kegiatan.

Program ini berisi kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor seperti papan informasi, pengadaan peralatan kantor seperti Laptop, PC Komputer, Tab, dan Scanner, selanjutnya kegiatan penyewaan rumah/gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan meubelair penyewaan rumah. Adapun rata-rata realisasi

kinerja program ini sebesar 100 % dan rata-rata realisasi keuangan sebesar 86,11%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan salah satu program utama penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 292.053.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp 275.612.739,- yang terdiri dari 2 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 98,75 % dan realisasi rata-rata realisasi keuangan sebesar 98,57 %. Adapun kegiatan yang telah berjalan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendidikan dan pelatihan formal

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang diikuti oleh pegawai BKD selama tahun 2018 seperti pelaksanaan Latihan Dasar CPNS Formasi tahun 2017, Workshop SPIP, Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan telah selesai dilaksanakan pada triwulan ke dua tepatnya pada Hari Selasa, 15 Mei 2018 bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gadis II telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik PNS, Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, dan Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.



Gambar 3.1
Gubernur Kaltara saat membuka acara Sosialisasi



Gambar 3.2
Narasumber dari BKN saat memberikan Materi

4. Program Pendidikan Kedinasan

Program pendidikan kedinasan merupakan salah satu program utama penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 393.486.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp 343.486.000,- yang terdiri dari 2 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 98,46 % dan realisasi rata-rata keuangan sebesar 83,39 %. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

4.1 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

Adapun jumlah Praja IPDN Asal Pendaftaran Kalimantan Utara Tahun 2018 sebanyak 76 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Praja IPDN Asal Pendaftaran Kalimantan Utara Tahun 2018

No	Tingkatan	Jumlah
1	Wasana Praja	3 orang
2	Nindya Praja	18 orang
3	Madya Praja	22 orang
4	Muda Praja	33 orang
	Total	76 orang

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Wasana atau tingkat 4 sebanyak 3 orang, Tingkat Nindya Praja atau tingkat tiga sebanyak 18 orang, Tingkat Madya Praja atau tingkat dua sebanyak 22 orang dan tingkat Muda Praja atau tingkat satu sebanyak 33 orang. Keseluruhan praja tersebut tersebar dalam beberapa lokasi pendidikan atau yang biasa disebut dengan regional adapun rincian masih masing jumlah praja berdasarkan regional atau lokasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Praja IPDN Asal Pendaftaran Kalimantan Utara Tahun 2018
berdasarkan regional atau lokasi pendidikan

No	Lokasi Kampus	Jumlah
1	Jatinangor	57 orang
2	Cilandak	6 orang
3	Sumatra Barat	5 orang
4	Sulawesi Selatan	4 orang
5	Sulawesi Utara	2 orang
6	NTB	1 orang
7	Papua	1 orang
	Total	76 Orang

Sumber: Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah terbanyak berada pada kampus Jatinagor yaitu sebanyak 57 orang. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara hanya melakukan pemantauan kepada Praja IPDN yang berlokasi di Jatinangor dan Cilandak dikarenakan efisiensi anggaran. Monitoring ini dilakukan guna mengetahui kondisi dan perkembangan kegiatan pendidikan Praja asal pendaftaran Kalimantan Utara. Dari hasil pemantauan tersebut disampaikan sesuai kalender akademik bahwa Wasana Praja akan direncanakan melaksanakan magang pada tanggal 4 s/d 24 Januari 2019, Ujian Komprehensif 17 s/d 22 Juni 2019 dan wisuda serta Pelantikan Pamong Praja Muda 20 s/d 31 Juli 2019.



Gambar 3.3
Saat melaksanakan monitoring Praja
IPDN

4.2 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

Setelah melalui seleksi Administrasi, TKD, Tes Kesehatan, Psikotes, Tes Kesamaptaan, dan wawancara maka diperoleh hasil dari seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2019 asal pendaftaran Kalimantan Utara sebanyak 33 orang sesuai Surat Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018 Nomor 810-157 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Penentuan Akhir Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018. Adapun jumlah masing berdasarkan asal kabupaten/kota di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus Pendaftaran Tahun 2018 berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Bulungan	12 orang
2	Nunukan	6 orang
3	Malinau	2 orang
4	Tana Tidung	-
5	Tarakan	13 orang
	Total	33 orang

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Berdasarkan tabel tersebut jumlah terbanyak dari Kota Tarakan sebanyak 13 orang selanjutnya Kabupaten Bulungan 12 orang, Kabupaten Nunukan 6 orang dan Kabupaten Malinau sebanyak 2 orang sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung belum ada yang lolos menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2018.



Gambar 3.4
Peserta saat persiapan Tes Kesehatan di
RSU Angkatan Laut di Tarakan



Gambar 3.5
Peserta saat mengikuti tes Psikologi di
Hotel Pangeran Khar

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur merupakan salah satu program utama penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 6.189.374.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp 6.675.490.000,- yang terdiri dari 11 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 106,22 % dan realisasi rata-rata keuangan 60,32 %. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

5.1 Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS

Dalam rangka memenuhi struktur organisasi yang masih kosong dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama maka dilaksanakanlah Seleksi terbuka dan *Job Fit* pada Tahun 2018. Adapun jabatan yang dilakukan seleksi terbuka yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Biro Pembangunan dan Kepala Bappeda dan Litbang, sedangkan yang menggunakan metode *Job Fit* adalah jabatan Kepala Biro Pemerintahan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Peserta yang mengikuti tahapan Seleksi Terbuka

No	Nama Jabatan	Jumlah yang mengikuti tahapan			Hasil	Dilantik
		Seleksi Administrasi	Aessment	Tes Tertulis, Presentasi dan Wawancara		
1	Sekretaris Daerah	18	16	8	3	(masih menunggu keputusan Presiden)
2	Kepala Biro Pembangunan	14	10	7	3	1
3	Kepala Bappeda dan Litbang	2	Dikarenakan kekurangan jumlah Pelamar maka akan dilakukan dengan proses mutasi/rotasi di Lingkup Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.			

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Adapun jadwal serta tahapan pelaksanaan seleksi terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1	Pembentukan Tim Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	23 April 2018	Sesuai SK Gubernur Kaltara Nomor 800/284.2/BKD Tanggal 23 April 2018 tentang Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018
2	Pembentukan Tim Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	06 Juli 2018	Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800.08/476.1/2.1- BKD Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Tim Narasumber/Praktisi/Profesional Uji Kompetensi melalui Assessment Test dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
3	Rapat Persiapan Seleksi Terbuka	18 Mei 2018	Ruang Sidang Pimpinan LAN Gedung B, Lt.2 Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat.
4	Pengumuman Seleksi Terbuka	18 Mei 2018	Pengumuman Pansel Nomor 08/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 18 Mei 2018
5	Penerimaan Berkas	21 Mei s/d 08 Juni 2018	Kantor BKD Prov.Kalimantan Utara Tanjung Selor
6	Pengumuman Kelulusan Seleksi Berkas	26 Juni 2018	Pengumuman dengan Nomor 10/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 26 Juni 2018
5	Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test	11 /d 13 Juli 2018	Bertempat di Assessment Center PKP2A I LAN Jatinangor.
6	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	30 Juli 2018	Pengumuman dengan Nomor 13/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 30 Juli 2018
7	Uji Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara	08 Agustus 2018	Ruang Pertemuan Swissbel Hotel Tarakan

8	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Tinggi Madya	10 Agustus 2018	SK Tim Pansel Nomor 17/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 10 Agustus 2018
9	Penetapan Pelantikan	-	(Masih Menunggu Keputusan Presiden)

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Gambar 3.6
Tim Pansel saat Rapat Persiapan Seleksi Terbuka JPT Madya



Gambar 3.7
Befoto bersama peserta Uji Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara

Adapun jadwal serta tahapan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro Pembangunan) Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Bappedan dan Litbang dan Kepala Biro Pembangunan) Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1	Pembentukan Tim Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	23 April 2018	Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/284.1/BKD Tanggal 23 April 2018 tentang Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018
2	Pembentukan Tim Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	24 Agustus 2018	Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800.08/609.1/2-BKD Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Tim Narasumber/Praktisi/Profesional Uji Kompetensi melalui Assessment Test dalam rangka seleksi terbuka Jabatan

			Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018
3	Rapat Persiapan Seleksi Terbuka	30 Mei 2018 dan 22 Juni 2018	Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Ruang Sekda Prov. Kaltara
4	Pengumuman Seleksi Terbuka	08 Juli 2018	Pengumuman Pansel Nomor 06/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 8 Juli 2018
5	Penerimaan Berkas	09 s/d 25 Juli 2018	Kantor BKD Prov.Kalimantan Utara Tanjung Selor
6	Pengumuman Kelulusan Seleksi Berkas	13 Agustus 2018	Pengumuman dengan Nomor 12/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 13 Agustus 2018
7	Uji Kompetensi melalui Metode Asessment Test	27 s/d 28 Agustus 2018	Bertempat di Assessment Center PKP2A I LAN Jatinangor.
8	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	12 September 2018	Pengumuman dengan Nomor 16/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 12 September 2018
9	Perubahan Pembentukan Tim Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	20 September 2018	Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/700.1/BKD Tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018
10	Uji Penulisan Makalah,	18 September 2018	Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 18 September 2018
11	Uji Presentasi dan Wawancara	25 September 2018	Ruang Pertemuan Swisbell Hotel Tarakan
12	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	25 September 2018	Pengumuman Pansel Nomor 23/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 25 September 2018
13	Penetapan dan Pelantikan	01 Oktober 2018	Berdasarkan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat

		Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Wakil Ketua KASN Nomor B-1972/KASN/9/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka dan Rencana Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka Gubernur Kalimantan Utara menetapkan dan melantik saudara Sunardi, ST, MT. Menjadi Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara
--	--	--

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Gambar 3.8
Para Peserta Aessment JPT Pratama melakukan foto bersama dengan tim Asessor



Gambar 3.9
Tim Pansel melakukan rapat persiapan Seleksi Terbuka JPT Pratama

Selain melalui metode seleksi terbuka dalam rangka mengisi kekosongan jabatan juga dilakukan melalui metode Job Fit untuk mengisi jabatan Kepala Biro Pemerintahan Umum hal ini dikarenakan dalam rangka efisiensi waktu dan biaya. Adapun tahapan beserta jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jadwal dan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1	Pengusulan Pengisian JPT Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum KASN	23 Oktober 2018	Sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/781/2-BKD Tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Pengisian JPT Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Kaltara.

2	Rekomendasi Pengisian JPT Pratama Karo Pemerintahan Umum dari KASN	08 November 2018	Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2532/KASN/11/2018 Tanggal 8 November 2018 Perihal Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
3	Penyampaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengikuti Uji Kompetensi dan Wawancara	12 November 2018	Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/855/BKD Tanggal 12 November 2018 Perihal Uji Kompetensi dan Wawancara
4	Undangan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Wawancara	6 Desember 2018	Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor 32/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 6 Desember 2018 Perihal Uji Kompetensi dan Wawancara
5	Pelaksanaan Uji Presentasi dan Wawancara	11 Desember 2018	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Prov. Kaltara
6	Rapat rekapitulasi Penilaian Presentasi dan Wawancara	11 Desember 2018	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Prov. Kaltara
7	Penetapan Pelantikan	-	

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Gambar 3.10
Tim Pansel *Job Fit* saat melaksanakan rapat hasil *Job Fit*



Gambar 3.11
Salah satu peserta *Job Fit* sedang melakukan uji Presentasi

5.2 Seleksi Penerimaan Calon ASN

Setelah melalui beberapa proses baik administrasi dan koordinasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Agustus 2018 ditetapkan sebanyak 500 formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 275 formasi tenaga guru, 175 formasi tenaga kesehatan dan 50 formasi tenaga teknis.

Sementara itu, kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Bulungan mendapatkan alokasi 216 formasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan 237 formasi, Pemerintah Kabupaten 230 formasi dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 214 formasi. Di Kalimantan Utara, hanya Kota Tarakan yang tahun ini belum mendapatkan formasi.

Adapun jadwal seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara
Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1	Pengumuman penerimaan	19 September - 02 Oktober 2018	-
2	Pendaftaran Online dan Penyerahan Berkas	26 September - 20 Oktober 2018	-
3	Pengumuman yang mengikuti SKD	23 Oktober 2018	-
4	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	01 s/d 10 November 2018	-
5	Pengumuman SKD	04 Desember 2018	-
6	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	07 s/d 09 Desember 2018	-
7	Pengumuman Kelulusan Akhir	01 Januari 2018	-

8	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada	07-21 Januari 2019	
---	---	--------------------	--

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Adapun rincian jumlah pelamar per tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rincian Jumlah Peserta Per Tahapan Seleksi

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Formasi	500	
2	Pelamar Online	5.457	
3	Hasil Verifikasi Berkas	4.752	
4	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	911	
5	Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	899	
6	Lulus	444	
7	Formasi yang kosong	56	

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan



Gambar 3.12
Peserta Formasi Guru saat sedang melakukan pendaftaran



Gambar 3.13
Peserta Formasi Umum saat sedang melakukan pendaftaran



Gambar 3.14
Gubernur Kaltara saat mengunjungi LAB
CAT pada saat pelaksanaan SKD
5.3 Penempatan PNS



Gambar 3.15
Peserta saat melakukan registrasi
ulang untuk mendapatkan pin sesi

I. Pengukuhan/Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pengembangan Karir dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan beberapa Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dengan agenda sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Kalimantan Utara Nomor 800/48/2-BKD tanggal 28 Januari 2018, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Tanggal 29 Januari 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Jumlah Pejabat yang dilantik

No	Jabatan	Jumlah yang dilantik
1	Administrator	84
2	Pengawas	171
TOTAL		255

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Adapun Pelaksanaan Pelantikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.16

2. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/1171/SJ Tanggal 21 Februari 2018 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tanggal 28 Februari 2018. Adapun Pelaksanaan Pelantikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.17

Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 28 Februari 2018

3. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Kalimantan Utara Nomor 800/451/2-BKD Tanggal 3 Juli 2018, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1287/KASN/6/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Hasil Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 123.65/3534/SJ Tanggal 6 Juni 2018 Perihal Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 4 Juli 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Pejabat yang dilantik

No	Jabatan	Jumlah yang dilantik	Ket
1	Pejabat Sekretaris Daerah	1	
2	Pimpinan Tinggi Pratama	1	
3	Administrator	35	
4	Pengawas	64	
TOTAL		101	

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Adapun Pelaksanaan Pelantikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.18
Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3.19

Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

4. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Nomor 800/715/2-BKD Tanggal 28 September 2018, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1972/KASN/9/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka dan Rencana Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/6770/SJ Tanggal 5 September 2018 Perihal Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah

Gambar 3.18

Pelantikan Pejabat Kalimantan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 4 Juli 2018.

Kalimantan Utara telah melaksanakan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Pejabat yang dilantik

No	Jabatan	Jumlah yang dilantik
1	Pejabat Sekretaris Daerah	1
2	Pimpinan Tinggi Pratama	2
3	Administrator	1
TOTAL		4



II. Pengalihan Personil berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pengalihan personil Kota Tarakan ke Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 meliputi bidang perhubungan dan kelautan perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Pengalihan Personil Tahun 2018

No.	Instansi	Bidang Pendidikan Menengah	Ket
1	UPT Pelabuhan Tengkeyu I (Bidang Perhubungan)	9	
2	UPT Pelabuhan Tengkeyu II (Bidang Kelautan dan Perikanan)	7	
Total		16	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 personil UPT Pelabuhan Tengkeyu I dan II dialihkan pada Tahun 2018. Masing-masing sebanyak 9 orang dari UPT Pelabuhan Tengkeyu I dan 7 orang dari UPT Pelabuhan Tengkeyu II.

III. Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu

Usul Pengangkatan dan Pembebasan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diusulkan oleh Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional

No	Jabatan	JENIS					Jumlah Selesai
		Pengangkatan Pertama	Pengangkatan Perpindahan	Kenaikan Dalam Jabatan	Pembebasan Sementara	Pengangkatan Kembali	
1	Pengawas Sekolah				1	1	2
2	Guru	2		35	9		46
3	Auditor			3	2		5
4	Pengawas Pemerintah Daerah			1			1
5	Apoteker			1			1
6	Asisten Apoteker			1			1
7	Dokter	3		4	3	4	14
8	Dokter Gigi						0
9	Fisioterapis				1		1
10	Nutrisionis						0
11	Perawat	3			4	23	30
12	Perawat Gigi						0
13	Bidan						0
14	Pranata Laboratorium Kesehatan				1		1
15	Radiografer				1	1	2
16	Rekam Medis	2					2
17	Pengawas Ketenagakerjaan						0
18	Pengawas Bibit Ternak				1		1
19	Penyuluh Pertanian						0
20	Penyuluh Kehutanan			1			1
Total							107

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan

IV. Mutasi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Tahun 2018

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73, terdapat beberapa jenis mutasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :

1. Mutasi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi adalah mutasi Pindah Wilayah Kerja dari Kab/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ke Kab/Kota Luar Provinsi Kalimantan Utara dan Mutasi dari Kab/Kota Luar Provinsi Kalimantan Utara ke Kab/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, adapun usul mutasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Persetujuan Pindah Instansi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi

No	Instansi	Persetujuan Pindah Instansi				Jumlah	Ket
		Masuk Wilayah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara		Keluar Provinsi Kalimantan Utara			
		Telah Selesai	Sedang Proses	Telah Selesai	Sedang Proses		
1	Prov. Kaltara			11		11	
2	Kab. Bulungan	2		10		12	
3	Kota Tarakan	3		34		37	
4	Kab. Nunukan	4		17		21	
5	Kab. Malinau	6		7		13	
6	Kab. Tana Tidung	1		2		3	
	TOTAL	16	0	81	0	97	

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan

2. Mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi adalah Mutasi Pindah Wilayah Kerja antar Kabupten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, adapun usul mutasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.16
Jumlah Persetujuan Pindah Instansi Mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

dari Instansi	Keputusan Pindah Instansi ke	Jumlah	Ket
---------------	------------------------------	--------	-----

	Kab. Bulungan	Kota Tarakan	Kab. Nunukan	Kab. Malinau	Kab. Tana Tidung		
Prov. Kalimantan Utara		1		1	2	4	
Kab. Bulungan		2				2	
Kota Tarakan	3		2		1	6	
Kab. Nunukan		2		1		3	
Kab. Malinau	7	4			1	12	
Kab. Tana Tidung	1			1		2	
TOTAL	11	9	2	3	4	29	

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan

5.4 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Ijin Belajar

Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah salah satu bentuk kesempatan untuk meng-*upgrade* pendidikan yang akan sekaligus sangat membantu dalam meniti karier. Seorang PNS jika ingin melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan seterusnya bisa memilih melalui tugas belajar atau ijin belajar.

Adapun jumlah peserta tugas belajar Tahun 2018 di Pemprov. Kaltara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Jumlah Peserta Tugas Belajar Tahun 2018

No	Tugas Belajar	Jumlah	Keterangan
1	S-1	-	-
2	S-2	5 orang	2 APBD, 3 APBN
3	Spesialis	12 orang	5 APBD, 7 APBN
	Jumlah	17 orang	17 orang

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian

Adapun jumlah peserta ijin belajar Tahun 2018 di Pemprov. Kaltara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Jumlah Peserta Ijin Belajar Tahun 2018

No	Ijin Belajar	Jumlah	Keterangan
1	D-3	14 orang	Program RPL Kesehatan
2	S-1	33 orang	

3	S-2	20 orang	
4	S-3	1 orang	
	Jumlah	68 orang	

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan



Gambar 3.21
Rapat Penentuan Peserta Ijin Belajar

5.5 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

Untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, maka BKD Prov. Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan melalui pemberian penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang memenuhi syarat.

Satya Lencana Karya satya adalah penghargaan yang diberikan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Adapun jumlah penerima Satya Lencana Karya Satya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Jumlah Penerima Satya Lencana Tahun 2018

No	Satya Lencana	Usul	Terbit	Keterangan
1	X (Sepuluh) Tahun	256	247	Sesuai dengan KEPRES RI nmor 118/TK/Tahun 2018 Tanggal 18 September 2018.
2	XX (Dua Puluh) Tahun	65	67	
3	XXX (Tiga Puluh) Tahun	24	24	

				Karya Satya XX Tahun bertambah 2 yang terbit dikarenakan dari usulan X Tahun ada yang memenuhi syarat untuk diterbitkan ke XX tahun
	Jumlah	345	340	

Sumber: Bagian Pembinaan dan Informasi Pegawai

5.6 Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memantapkan implementasi reformasi birokrasi maka pelaksanaan peraturan disiplin PNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu didukung dengan kegiatan penyelesaian kasus kepegawaian secara terpadu melalui pembahasan dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kaltara, dengan melibatkan beberapa pejabat dari instansi terkait, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Biro Hukum, Inspektorat dan Badan kepegawaian Daerah.

Selain itu kasus kepegawaian lainnya seperti permohonan izin perkawinan (poligami) dan perceraian, serta penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian, perlu penanganan khusus sehingga dapat menumbuhkan kesadaran PNS akan kedudukan, hak dan kewajibannya serta mewujudkan tertib administrasi kepegawaian. Adapun rekapitulasi jumlah dan jenis pelanggaran disiplin PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rekapan Jumlah dan Jenis Pelanggaran Disiplin PNS

Sumber: Bagian Pembinaan dan Informasi Pegawai

No	Jenis	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	Narkotika	2) Pemberhentian sementara) Masih dalam proses di tim penanganan kasus
2.	Perceraian	6	Selesai
3.	Pelanggaran Disiplin	151) Selain pelanggaran tidak masuk kerja juga ada pelanggaran disiplin yang masuk dalam PP Nomor 53 tahun 2010
4.	Kriminal	2) Pemberhentian sementara) Dalam proses di tim penanganan kasus
5.	sakit	3) Telah dilakukan tes kesehatan oleh tim kesehatan) Dalam proses pensiun dini
6.	Perselingkuhan	1	Telah diberikan sanksi
7.	LHKPN	25	Telah dijatuhkan sanksi dalam bentuk SK
8.	Narkotika	-	
Jumlah		190	

5.7 Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah

Kegiatan Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah pada anggota KORPS bertujuan untuk memperingati HUT Provinsi

Kalimantan Utara yang ke 5, dengan diadakan kegiatan ini disamping mengecek kesehatan juga melakukan donor darah untuk kesehatan sekaligus memberikan stock darah bagi yang membutuhkan, kegiatan ini juga bermaksud untuk memberikan kesadaran ASN betapa pentingnya kesehatan untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan dalam menghadapi persaingan global dalam mencapai ASN yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

BKD Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Prov. Kaltara dan PMI Kabupaten Bulungan melaksanakan Tes Kesehatan dan Donor Darah pada tanggal 22 April 2018 bertempat di lapangan Agatis yang diikuti oleh 191 orang PNS.

Adapun tes kesehatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan Gula Darah, Pemeriksaan Asam Urat, dan Pemeriksaan Kolesterol serta melakukan pemeriksaan tensi. Kegiatan ini bertujuan agar ASN sebagai pelayan masyarakat disamping dengan beban kerja yang tinggi juga harus menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan stamina yang baik. Karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehingga diharapkan dengan kondisi yang prima ASN dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.



Gambar 3.22
Spanduk Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Donor Darah



Gambar 3.23
Suasana Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Donor Darah

5.8 Ujian Penyesuaian Ijazah

Dalam rangka memfasilitasi pegawainya untuk selalu meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikan pangkatnya apabila diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh melalui pendidikan tersebut dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPI). Adapun rincian pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di Kaltara yaitu:

Tabel 3.21
Jumlah Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah

No	Nama	Jumlah				Lulus
		Pelamar	Lolos Berkas	Tes CAT	Wawancara	
1	Penyesuaian Ijazah	29	23	18	18	18
Jumlah		29	23	18	18	18

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Gambar 3.24
Peserta saat mengikuti Tes CAT



Gambar 3.25
Peserta saat mengikuti Tes Wawancara

5.9 Pembinaan dan Evaluasi SKP

Sesuai dengan amanat undang – undang dan peraturan pemerintah beserta turunannya, sasaran kinerja pegawai negeri sipil harus mulai diisi pada awal tahun dan diberikan penilaiannya pada akhir tahun tiap periodenya, untuk menunjang penyusunan SKP tersebut telah disiapkan aplikasi yang mempermudah setiap pegawai dalam mengisinya yaitu aplikasi e-SKP. Dalam hal memastikan penyusunan SKP yang baik, benar dan tepat waktu, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi e-SKP dalam penyusunan SKP.

Ruang lingkup kegiatan Monitoring Implementasi dan evaluasi e-SKP meliputi OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, SMA/SMK dan SLB serta UPT Dinas yang ada di Kab/Kota di wilayah kerja Pemprov. Kalimantan Utara.

Mengacu pada pelayanan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan evaluasi e-SKP, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan tahapan mengirimkan surat implementasi dan evaluasi SKP kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditanda tanganin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah yang didalamnya disertakan batas waktu penyusunan dan pengumpulan berkas SKP, Adapun rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi e-SKP sebagai berikut:

Tabel 3.22
Jadwal Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SKP Tahun 2018

No.	Waktu	Lokasi	Instansi
1.	Sabtu, 10 Februari 2018	Ruang Rapat BKD Gedung Gadis Lt.2	Direktur RSUD Tarakan, Kepala Dinas Pendidikan, SMA/SMK Negeri dan SLB di Kota Tanjung Selor
2.	Sabtu, 10 Februari 2018	Ruang Rapat BKD Gedung Gadis Lt.2	Seluruh PNS di lingkup BKD Provinsi Kalimantan Utara
3.	Kamis, 26 Juli 2018	Ruang Pertemuan SMK Negeri 1 Tarakan	Cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah Tarakan serta 6 SMA/SMK Negeri di

			Tarakan
4.	Kamis, 2 Agustus 2018	Ruang pertemuan cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah Nunukan	Cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah Nunukan, 15 SMA/SMK Negeri di Nunukan dan 1 SLB
5.	Kamis, 9 Agustus 2018	Ruang Pertemuan SMK Negeri 2 Malinau	Cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah Malinau, 22 SMA/SMK Negeri di Malinau dan KTT serta 1 SLB
6.	Setiap hari, Juli – September 2018	Ruang Konsultasi Badan Kepegawaian Daerah	14 SMA/SMK Negeri di Bulungan, 1 SLB dan 42 OPD yang berkantor di Tanjung Selor

Sumber: Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai

Secara keseluruhan kegiatan pembinaan dan monitoring SKP berjalan lancar dengan ditandai adanya tingkat kemauan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil untuk segera mengumpulkan SKP 2017 dan menyusun kontrak kerja 2018, serta mulainya diupload arsip – arsip kepegawaian kedalam DMS/eMASN. Seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara menyambut baik adanya kegiatan implementasi dan evaluasi SKP. Karena ini menjadi sarana mengingatkan kembali salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Disisi lain kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk mengecek kembali performa dan multitasking aplikasi. Adapun kendala teknis di beberapa hal, sudah menjadi catatan dan dijadikan masukan sebagai bahan koreksi dan penyempurnaan dikemudian hari.

Performa aplikasi harus ditingkatkan karena ada beberapa tool yang belum ada atau masih menyulitkan sehingga menghambat dalam proses penyusunan SKP. Perlu dibuatkan panduan/tutorial yang lebih teknis terkait penggunaan aplikasi e-SKP sehingga bisa dibagi kepada seluruh pegawai di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang masih mengalami kebingungan dalam penggunaannya.

Selain itu disiapkan juga simulasi secara langsung untuk pegawai yang datang ke kantor BKD untuk konsultasi.

Selanjutnya setiap pegawai aau bawahan harus selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dalam hal sinkronisasi kegiatan tugas jabatan, target- target serta angka kredit terutama bagi jabatan fungsional tertentu seperti guru, perawat dll, karena ada peraturan lain yang lebih teknis dalam memasukkan nilainya.



Gambar 3.26
Monitoring dan Evaluasi Cabang Dinas
di Kota Tarakan



Gambar 3.27
Monitoring dan Evaluasi di Nunukan

5.10 Pengambilan Sumpah Janji PNS

Dalam rangka upaya tertib administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan Dinas. Pengambilan sumpah tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Utara. Pada kesempatan tersebut sebanyak 149 Pegawai Negeri Sipil diambil sumpah/janjinya.



Gambar 3.28
Gubernur Kaltara saat menyerahkan Berita Acara
Pengambilan Sumpah/Janji kepada Perwakilan

5.11 Ujian Dinas

Ujian dinas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat

Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.

Adapun Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II yang dilaksanakan oleh BKD Prov. Kaltara dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal adapun rincian jumlah peserta yaitu:

Tabel 3.23
Jumlah Peserta Ujian Dinas

No	Ujian Dinas	Jumlah				Lulus
		Pelamar	Lolos Berkas	Tes CAT	Wawancara	
1	Tingkat I	34	16	15	14	14
2	Tingkat II		8	4	4	4
Jumlah		34	24	19	18	18

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan



Gambar 3.29
Peserta saat melakukan tes wawancara Ujian Dinas



Gambar 3.30
Pj. Sekda dan Kepala BKD saat memberikan pengarahan sebelum tes CAT dimulai

6 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

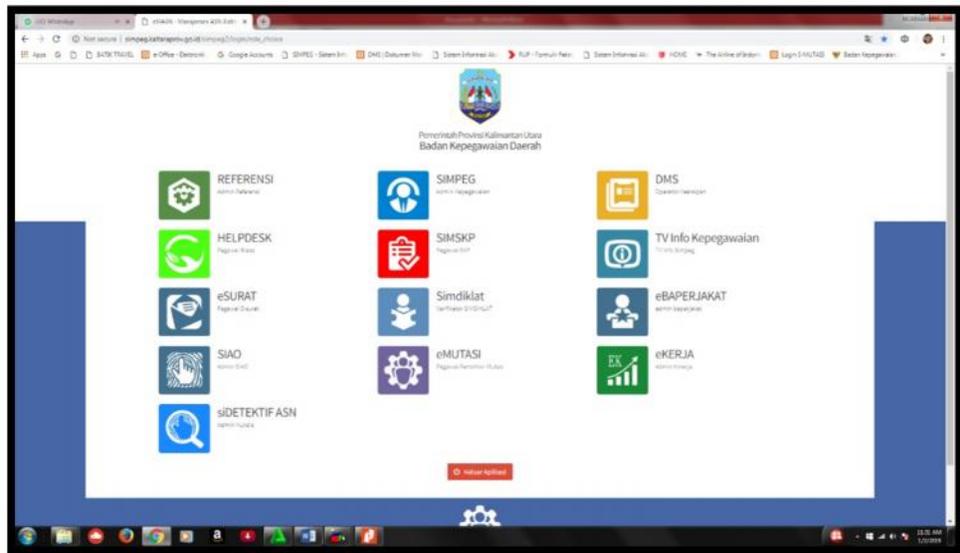
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian merupakan salah satu program utama penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. 1.631.593.400,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.542.304.400,- yang terdiri dari 7 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 101,98 % dan realisasi rata-rata keuangan sebesar 77,54 %. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

6.1 Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG

Pembangunan dan pengembangan system informasi manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan yang dilakukan berkelanjutan dalam rencana strategis dan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian diwujudkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan kode rekening kegiatan 4.05.01.01.18.01.

System informasi manajemen kepegawaian yang telah terbangun sebelum tahun 2018 meliputi 11 (sebelas) aplikasi yang terdiri atas :

1. Referensi
2. Helpdesk
3. Elektronik Surat (eSurat)
4. Sistem Informasi Absensi Online (SIAO)
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
6. Elektronik SKP (eSKP)
7. Sistem Informasi DIKLAT (Simdiklat)
8. Elektronik Mutasi (eMutasi)
9. Document Manajemen Sistem (DMS)
10. TV Info Kepegawaian
11. Elektronik BAPERJAKAT (e BAPERJAKAT)



Gambar 3.31
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(electronic management ASN)

Ke 11 (sebelas) aplikasi tersebut di atas telah berjalan berdasarkan tahapan masing-masing yang meliputi tahap sosialisasi, implementasi dan evaluasi. Sementara pada Tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengembangan sebanyak 2 (dua) System informasi manajemen kepegawaian yang terdiri atas :

1. Elektronik Kerja (eKERJA)
2. siDETEKTIF ASN(eHUKDIS)

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Lintas Sektoral

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 ini dimulai dengan membangun tim koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.97/2018 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi absensi Online dan e-kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.98/2018 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Dokumen Manajemen Sistem Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.

3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.738/2018 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.97/2018 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi absensi Online dan e-kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.739/2018 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.98/2018 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Dokumen Manajemen Sistem Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.

2. Sosialisasi E-Kerja

Implementasi eKinerja disusun dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 39 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 111 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepegawaian kepada calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 30 April 2018 berdasarkan berita daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 nomor 39.

Pada Bulan April sampai dengan awal Bulan Mei 2018 dalam rangka memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam dilakukan sosialisasi eKinerja ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan jadwal masing – masing. Disamping sosialisasi ke setiap OPD dan rapat koordinasi seluruh operator se Provinsi Kalimantan Utara, sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 Mei 2018 bertempat Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara. Berikut ini dokumentasi di beberapa OPD sebagai berikut



Gambar 3.32
Sosialisasi di Dinas Kesehatan Prov. Kaltara



Gambar 3.33
Sosialisasi di BPPD Prov. Kaltara



Gambar 3.34
Sosialisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga
Prov. Kaltara



Gambar 3.35
Sosialisasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Prov. Kaltara



Gambar 3.36
Sosialisasi e-Kinerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
se Provinsi Kalimantan Utara

3. SOSIALISASI siDETEKTIF ASN (eHUKDIS)

Pembangunan aplikasi eHukdis yang kemudian dikembangkan menjadi siDetektif ASN menjadi materi proyek perubahan pada Pendidikan Pelatihan Tingkat 3 di PKP2A III Lan Samarinda. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kota Tarakan dan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

Sosialisasi di Kota Tarakan difasilitasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Tarakan bertempat di Ruang Pertemuan SMKN 1 Kota Tarakan yang diselenggarakan pada Hari Senin, 5 November 2018 memulai

sosialisasi dan ujicoba pertama sistem deteksi dini pembinaan disiplin ASN Kaltara (si Detektif ASN) bersama Kepala Cabang Dikbud, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha SMA/SMK/SLB se Kota Tarakan.



Gambar 3.37
Sosialisasi si Detektif ASN di Tarakan

4. REKONSILIASI DATA DAN EVALUASI SIMPEG

Kegiatan rekon data dan Evaluasi SIMPEG diikuti oleh bagian data BKPSDM/BKPP Kabupaten Kota, Narasumber Bapak Andi Hikmal, S.Sos dan Ibu Mellinda Nencytarani, S.Kom membawakan materi Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG. Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG ini dilakukan mengingat validasi data yang merupakan hal penting dalam pelayanan kepegawaian.



Gambar 3.34
Acara Rekonsiliasi Data dan Evaluasi SIMPEG di Tarakan

5. Colocation Server

Dalam rangka membangun Big Data Kepegawaian dengan memperhatikan kondisi jaringan internet di Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilakukan upaya untuk optimalisasi fungsi server dengan melakukan Colocation Server dengan penyedia jasa PT. CyberTechTonic Pratama di Jakarta.



Gambar 3.35
Saat Pemindahan Server SIMPEG di Jakarta

6.2 Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Perka BKN No.18 Tahun 2010 tentang SAPK On-Line : Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On-Line (SAPK-OnLine).

SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi. Fasilitas akses SAPK disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Biro Kepegawaian di Instansi Pusat. Bagi instansi yang sudah teregister di BKN akan diberikan kode akses yaitu *user-id* dan *password*, sehingga dapat mengakses *database* kepegawaian yang ada di BKN.

Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat Tanggal 19-20 April di BKN Pusat Jakarta, adapun Materi yang disampaikan antara lain :

Tabel 3.24
Daftar Materi Beserta Narasumber Kegiatan SAPK

No	Materi	Narasumber
1	Pengarahan Kepala BKN	Kepala BKN
2	NCSIS ADMIN	Kasub Direktorat Informasi Kepegawaian
3	My SAPK	Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik
4	Peremajaan Data	Kasi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil
5	Rekon Mandiri	Kasub Direktorat Pengolahan Data
6	Human Resources	Kasi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
7	Kenaikan Pangkat KPO-Less Paper	Kasi penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
8	Integrasi Data	Kasub Direktorat Pengembangan Teknologi Informasi
9	Pensiun PPO Less-paper	Kasi penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil
10	Modernisasi Manajemen ASN	Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

Sumber: Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai

Sasaran peserta kegiatan Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah Administrator dan operator BKD Kabupaten Kota dan BKD Provinsi dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Jumlah Peserta Kegiatan SAPK Tahun 2018

No	Nama Instansi	Jumlah	Keterangan
1	BKD Prov. Kaltara	18 orang	Administrator SAPK, NCSIS, HR dan Operator Peremajaan

				Data, Kenaikan Pangkat dan Pensiun
2	BKPSDM Bulungan	Kab.	3 orang	Administrator SAPK dan Operator SAPK
3	BKPSDM Tana Tidung	Kab.	2 orang	Administrator SAPK dan Operator SAPK
4	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tarakan	Dan Kota	2 orang	Administrator SAPK dan Operator SAPK
5	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Malinau	Dan Kab.	3 orang	Administrator SAPK dan Operator SAPK
6	BKPSDM Nunukan	Kab.	1 orang	Administrator SAPK

Dukungan operator sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) sangat berperan besar dalam mengisi data-data setiap pegawai serta meremajakan data didalam sistem aplikasi tersebut, hal ini dapat memudahkan dalam proses administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.



Gambar 3.40
Berfoto bersama Kepala BKN dan narasumber saat acara BIMTEK SAPK di BKN Jakarta

6.3 Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. Kartu Pegawai merupakan kartu identitas PNS dan berfungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian, Kartu Pegawai diberikan kepada pegawai yang secara penuh telah berstatus PNS yang dimana Kartu Pegawai merupakan salah satu syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat, pengajuan pensiun, dan pengajuan pengembalian THT Taspen.

Usulan Karpeg, Karis dan Karsu dari SKPD dan Guru-guru yang disampaikan kepada BKD antara lain

Tabel 3.14
Jumlah Usulan KARIS, KARSU dan KARPEG Tahun 2018

No	Nama Berkas	Usulan 2018	Jumlah yang Terbit
1	Kartu Istri	69 Berkas	69 Berkas
2	Kartu Suami	49 Berkas	49 Berkas
3	Karpeg	48 Berkas	48 Berkas
	Jumlah	166 Berkas	166 Berkas

Sumber: Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai



Gambar 3.41
Pembukaan Acara Pelayanan Penerbitan KARPEG, KARIS DAN KARSU PNS



Gambar 3.42
Verifikasi Berkas Kelengkapan Penerbitan KARPEG, KARIS dan KARSU

6.4 Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS

Selama Tahun 2018 sebanyak 40 SK pensiun telah selesai diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltara adapun rincian berdasarkan jenis pensiunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Jumlah PNS yang pensiun berdasarkan jenis pensiun Tahun 2018

No	Jenis Pensiun	Jumlah
1	Pensiun Atas Permintaan Sendiri	2 orang
2	Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)	31 orang
3	Pensiun Janda/Duda/Anak	7 orang
4	Pensiun karena tidak cakap jasmani atau rohani	-
	Total	40 orang

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

6.5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi

Sistem Informasi Absensi Online (SIAO) adalah sistem berbasis web yang berfungsi untuk mengelola absensi sidik jari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan dan pelaksanaan SIAO dimulai pada awal tahun 2016 hingga saat ini.

Tujuan dibangunnya SIAO adalah untuk menyediakan sarana pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kehadiran ASN secara elektronik. Pengendalian dan pengawasan SIAO dapat dilaksanakan secara *online* melalui internet yang dapat diakses dari berbagai macam piranti seperti: komputer, laptop ataupun *smartphone*.

Dalam perjalanannya, SIAO telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya server SIAO merupakan server berbasis sistem operasi Ubuntu (versi 12.04). Aplikasi yang dibangun pada server SIAO pada awalnya menggunakan bahasa pemrograman Ruby dan Web.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kendala pun ditemukan. Yang mana mengharuskan server SIAO bermigrasi dari sistem operasi ubuntu versi 12.04 menjadi ubuntu versi

16.04. Aplikasi SIAO pusat juga mengalami perubahan, yang awalnya menggunakan gabungan bahasa pemrograman Ruby dan Web menjadi aplikasi murni berbasis bahasa pemrograman Web. Pada akhir November 2018, server SIAO dimigrasikan ke perangkat yang baru. Pada perangkat baru, server SIAO menggunakan ubuntu versi 18.04.

Implementasi SIAO di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun juga mengalami perubahan. Pada awalnya, SKPD hanya menggunakan mesin sidik jari yang ditempatkan di kantor masing-masing. Kemudian berubah menggunakan mesin sidik jari dan server lokal (*mini-pc*) sebagai perangkat pendukung tambahan.

Aplikasi SIAO versi 1 memiliki *database* pegawai yang berbeda dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Kemudian sisten ini dirubah pada aplikasi SIAO versi 2 menjadi satu *database* sentral yang selalu tersinkron sesuai dengan *database* kepegawaian di SIMPEG.

Pada tahun 2018 terdapat rencana pemasangan di 83 instansi di wilayah provinsi Kalimantan Utara. 83 instansi ini terdiri dari instansi seperti UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab./Kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab./Kota, Cabang Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Perikanan, Badan Penghubung, Rumah Sakit Umum Provinsi, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB).

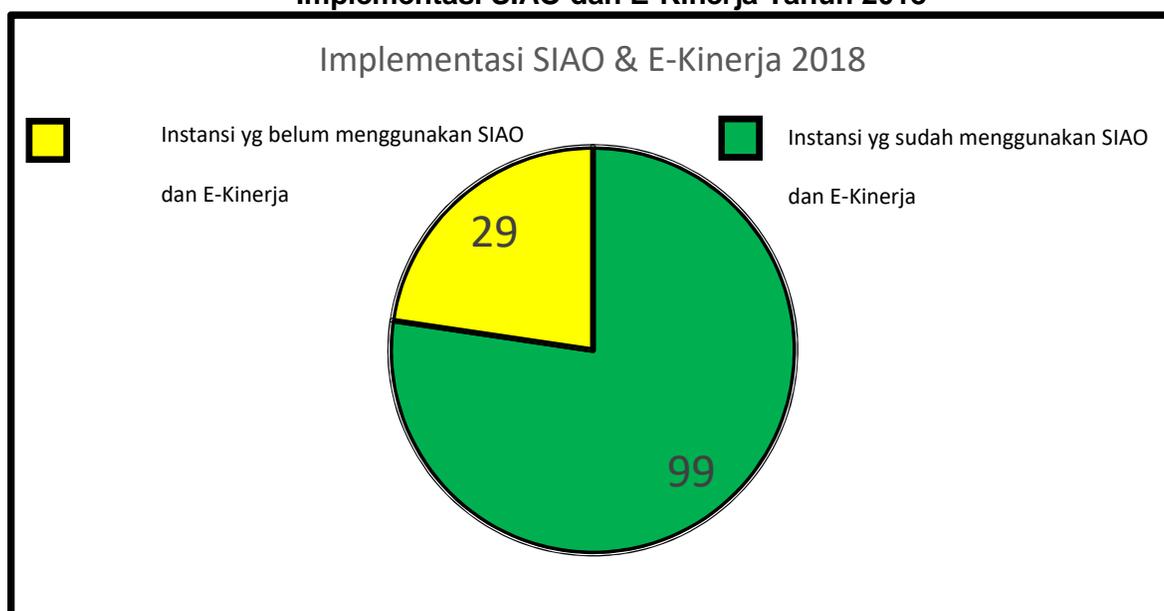
Namun dari 83 instansi tersebut tidak semua memenuhi persyaratan untuk diimplementasikan Sistem Informasi Absensi *Online* (SIAO). Masih terdapat instansi yang tidak memiliki jaringan internet via kabel dan bahkan jaringan listrik. Dari 83 instansi hanya 54 instansi yang dinilai dapat menggunakan sistem SIAO.

Tabel 3.28
Implementasi SIAO dan E-Kerja Tahun 2018

Jumlah instansi yang belum terpasang SIAO pada awal tahun 2018	Jumlah instansi yang sudah terpasang SIAO s.d. Triwulan IV tahun 2018	Jumlah instansi yang belum terpasang SIAO pada akhir tahun 2018
83	54	29

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018 telah tercapai 54 unit pemasangan baru. 29 instansi lainnya dinilai tidak bisa menggunakan SIAO dikarenakan belum adanya jaringan internet fiber yang stabil serta jaringan listrik. Secara keseluruhan, 77,34% instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah menggunakan SIAO.

Grafik 3.1
Implementasi SIAO dan E-Kinerja Tahun 2018



Perlu adanya penambahan jumlah perangkat lunak (*remote software*) untuk menunjang *maintenance* server pusat dan server lokal. Penyediaan *Uninterruptible Power Source* (UPS) di masing-masing instansi dinilai perlu sebagai solusi sementara dalam menangani gangguan listrik..

Pada Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Hotel Lotus Panaya Tarakan dilaksanakan Evaluasi SIAO. Kepala BKD membawakan materi evaluasi SIAO serta menghimbau agar Operator SIAO selalu memantau kehadiran pegawai SKPD setiap hari. Apabila ada pegawai yang tidak masuk maka operator SIAO wajib melakukan konfirmasi ke pegawai tersebut kenapa tidak masuk kerja. Apabila memang pegawai tersebut memang absen kerja maka harus ditindak lanjuti pembinaan atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.6 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan Pangkat dilaksanakan pada Periode April dan Oktober. Pengusulan ditujukan ke Kantor regional VIII BKN Banjarmasin yang didasarkan dari Usul Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kenaikan Pangkat yang diusulkan meliputi :

- a. Kenaikan Pangkat Pilihan (Struktural)
- b. Kenaikan Pangkat Reguler (Non Struktural dan Non Fungsional Tertentu)
- c. Kenaikan Pangkat Pilihan (Fungsional Tertentu)

Adapun Usul Kenaikan Pangkat Periode April yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.29
Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2018

No.	Instansi	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	Total
1	Prov. Kaltara	2	1	16	18	24	65	27	26	29	36	6	10	2	4	1	267
2	Kab. Bulungan		1	1	18												20
3	Kab. Malinau		1	7	15												23
4	Kab. Nunukan		4	23	26												53
5	Kota Tarakan	1	1	8	14												24
6	Kab. Tana Tidung			2	9												11
	Total	3	8	57	100	24	65	27	26	29	36	6	10	2	4	1	398

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kenaikan pangkat terbanyak pada periode April Tahun 2018 adalah Golongan IV/a sebanyak 100, kemudian Golongan III/c sebanyak 65 dan Golongan IV/b sebanyak 57, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan I/b sebanyak 1 orang kemudian Golongan I/d sebanyak 2 orang dan Golongan IV/d sebanyak 3 orang.

Selanjutnya pada periode Oktober 2018 adapun yang mendapatkan persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2018

No.	Instansi	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	I/d	I/b	Total
1	Prov. Kaltara	6	2	21	12	33	33	36	3	5	5	7	1	1	165
2	Kab. Bulungan		4	17											21
3	Kab. Malinau		1	14	19										34
4	Kab. Nunukan		1	29	27										57
5	Kota Tarakan			10	4										14
6	Kab. Tana Tidung		2	1	4										7
	Total	6	10	92	66	33	33	36	3	5	5	7	1	1	298

Sumber: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kenaikan pangkat terbanyak pada periode Oktober Tahun 2018 adalah Golongan IV/b sebanyak 92, kemudian Golongan IV/a sebanyak 66 dan Golongan III/b sebanyak 36, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan I/b sebanyak 1 orang kemudian Golongan I/d sebanyak 1 orang dan Golongan III/a sebanyak 3 orang.

6.7 Rapat Kerja Kepegawaian

Kegiatan Rapat Kerja Kepegawaian merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BKD Prov. Kaltara guna meningkatkan pelayanan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas aparatur yang professional di Kaltara. Raker kali ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Udin Hianggio. Hadir pula dalam Raker tersebut, Kepala Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ahmad Jayus, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Slamet Nugroho, dan Kepala PT Taspem (Persero) Cabang Tarakan, H Kamiso dan peserta raker yang berasal dari pengelola kepegawaian OPD dan BKPSDM dan BKPP Kabupaten/Kota. Tema raker kepegawaian tahun ini adalah "Manajemen Kepegawaian dan Terpadu dan Bersinergi



Gambar 3.43
Wakil Gubernur Kaltara saat memberikan Cenderamata kepada narasumber



Gambar 3.44
Kepala BKD saat menjadi narasumber Rapat Kerja Kepegawaian se-Kaltara

7 Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI

Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan Korpri merupakan salah satu program pendukung penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp. **6.189.374.000,-** dan anggaran perubahan sebesar Rp 1.034.178.000,00 yang terdiri dari 3 kegiatan. Adapun rata-rata realisasi kinerja program ini sebesar 64,57 % dan rata-rata realisasi keuangan 46,04 %. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

7.1 Pelaksanaan STQ ASN tingkat Nasional

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) KORPRI Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilakukan dengan sistem seleksi administratif (verifikasi berkas) oleh panitia STQ Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, OPD serta instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun jumlah yang dimusabaqahkan ada 5 cabang dan 9 golongan baik putra dan putri yaitu sebagai berikut:

1. Cabang Tartil Al-Qur'an (TQ).
2. Cabang Tilawah Al-Qur'an (TL).
3. Cabang Hifzh Al-Qur'an (HQ).

Cabang Musabaqah Cabang Musabaqah Cabang Dakwah Al-Qur'an (DQ).

4. Cabang Khath Al-Qur'an (KQ).

Berdasarkan proses seleksi dan verifikasi berkas yang telah dilakukan oleh Tim Koordinator Seleksi dan Verifikasi Berkas, dengan mempertimbangkan kelengkapan berkas, minat, bakat dan pengalaman perlombaan yang pernah diikuti serta prestasi yang pernah diperoleh, maka Tim berkesimpulan dan memutuskan untuk menetapkan pemenang STQ ASN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 14 orang yang selanjutnya untuk mengikuti MTQ KORPRI ASN tingkat Nasional di Jakarta.

KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mengikuti MTQ KORPRI IV Tingkat Nasional di Jakarta, KORPRI Prov. Kaltara mengirimkan 14 peserta untuk mengikuti cabang-cabang lomba dengan didampingi pelatih dan official. Sebelum bertanding peserta MTQ mengikuti Training Center (TC) yang dilaksanakan di wisma Syahida Inn, dalam rangka bimbingan dan pelatihan guna pematapan materi.

Pelaksanaan MTQ KORPRI IV berlangsung dari tanggal 10 s.d 18 November 2018 diikuti kafilah dari 34 provinsi dan 76 kementerian/lembaga. Dalam kegiatan tersebut KORPRI Provinsi Kalimantan Utara meraih Juara II dalam Cabang Khath al-Qur'an, Gol. Kaligrafi Kontemporer (Putra) dan Juara Harapan II Golongan Da'l dan Da'iyah (Putra).



Gambar 3.45
Pj. Sekretaris Daerah saat memberikan arahan kepada Kafilah MTQ ASN KORPRI Kaltara



Gambar 3.46
Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional

7.2 Pelaksanaan Rapat Kerja KORPRI

Pelaksanaan rapat kerja KORPRI Kalimantan Utara pada tahun 2018 belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya Ketua KORPRI Kaltara yang definitif sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih sebatas koordianasi kepada Dewa Pengurus KORPRI Nasional di Jakarta.

7.3 Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI

Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018 di Gedung RSUD Tarakan. Kegiatan ini membahas mengenai Bantuan hukum yaitu:

1. Kebijakan Nasional Bantuan Hukum ASN;
2. Kebijakan Bantuan Hukum ASN Prov. Kaltara;
3. Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 dan PERKA BKN No. 21 Tahun 2010

Pembicara atau Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI adalah :

1. Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3.47
Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional



Gambar 3.48
Gubernur Kaltara saat memberikan hadiah kepada dua ASN yang memenangkan dalam MTQ ASN Tingkat Nasional

8 Kegiatan Lain-Lain

8.1 Penyerahan SK CPNS Oleh MENPAN-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menghadiri acara Penyerahan SK Pengangkatan 423 CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, di Ruang Serbaguna Gedung Gadis II. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggio, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, para Bupati dan Walikota di Provinsi Kaltara, Kepala OPD.



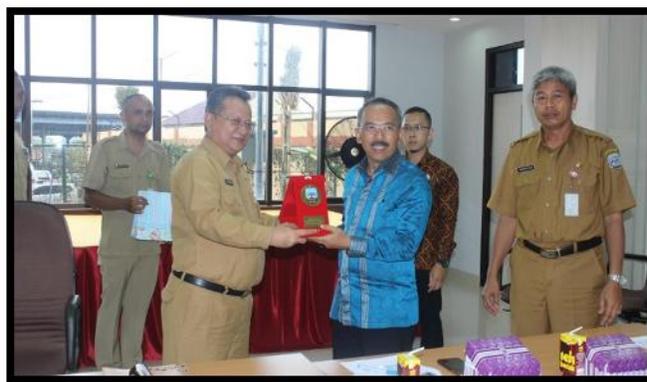
Gambar 3.49
MENPAN-RB saat berfoto bersama
dengan Gubernur dan CPN Tahun 2017



Gambar 3.50
MENPAN-RB saat memberikan SK CPNS
secara simbolis kepada CPNS formasi
Tahun 2017

8.2 Kunjungan Kerja BKD Prov. Jawa Barat

Kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melakukan konsultasi teknis, terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS di lingkup Pemprov Kaltara. Mulai dari seleksi kompetensi dasar (SKD) hingga seleksi kompetensi bidang (SKB). Kedatangan Pemprov Jabar disambut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Drs. H. Zainuddin HZ M.Si



Gambar 3.51
Asisten Administrasi Umum saat menyerahkan Cenderamata
kepada Kepala BKD Jawa Barat saat melakukan kunjungan
kerja Ke Pemprov. Kaltara

8.3 Peringatan HUT KORPRI ke 47 Tahun 2018

Memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI sekaligus dirangkai dengan peringatan HUT ke-73 PGRI diselenggarakan upacara di Lapangan Agathis Tanjung Selor dengan peserta upacara seluruh jajaran ASN dan para Guru, sebagai Inspektur Upacara (Irup) Dr H Irianto Lambrie. Dalam upacara tersebut disampaikan sambutan Presiden Joko Widodo dan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy.

Upacara HUT ke-47 KORPRI dan HUT ke-73 PGRI juga dirangkaikan dengan acara tambahan yaitu:

1. Pemberian tanda jasa Satyalancana;
2. Pemberian Surat Kenaikan Pangkat Periode Oktober;
3. Lauching Sistem Informasi GTK dan Si Detektif ASN.



Gambar 3.52
Gubernur Kaltara saat menyerahkan secara simbolis Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Kepada Perwakilan PNS



Gambar 3.53
Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3.54
Gubernur Kaltara saat menandatangani Launching Sistem Informasi GTK dan Si Detektif ASN

B. Capaian Program dan Kegiatan

Adapun secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja dari seluruh Program yang dilaksanakan selama Tahun 2018 adalah sebesar 95,50 sedangkan untuk capaian keuangan selama pada Tahun 2018 adalah realisasi fisik belanja langsung dan tidak langsung sebesar 93,28 dan realisasi keuangan sebesar Rp 14.183.703 642,- atau sebesar 77,45 %. Adapun capaian rincian keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja	18.313.999.373		
	Belanja Tidak Langsung	5.488.435.434		
1	Belanja Pegawai	5.488.435.434		
	Belanja Langsung	12.825.563.939		
1	Belanja Pegawai	2.741.900.000		
2	Belanja Barang dan Jasa	9.082.606.139		
3	Belanja Modal	1.001.057.800		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.313.999.373)	(18.313.999.373)	(3,97)

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan

Adapun capaian kinerja dan realisasi keuangan per program dan kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi			
					Kinerja	%	Anggaran	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	55%	2.553.230.000,00	54,18	98,51	2.127.391.922	83,32
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1000 lembar	21.000.000,00	1000	100	14.976.500	71,32
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	95.800.000,00	12	100	55.975.308	58,43
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	18 unit	100.000.000,00	18	100	32.528.150	32,53
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	12 unit	8.600.000,00	12	100	8.402.700	97,71

	perizinan kendaraan dinas/operasional	disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan						
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administratif keuangan	12 bulan	1.081.400.000,00	12	100	898.890.800	83,12
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	15.000.000,00	12	100	14.908.395	99,39
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	10.000.000,00	10	100	9.992.500	99,93
8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	150.000.000,00	12	100	149.939.405	99,96
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	75.000.000,00	12	100	44.596.880	59,46
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000.000,00	12	100	4.509.400	45,09
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemakaian bahan bacaan ilmu pengetahuan praktis yang tersedia dengan memadai	1095 eksemplar	5.000.000,00	730	66, 67	2.545.000	50,90
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2500 porsi	181.430.000,00	1973	78, 92	112.084.550	61,78
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kali	500.000.000,00	76	152	486.771.334	97,35
14	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	100 kali	300.000.000,00	78	78	291.271.000	97,09
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Penyerapan Anggaran seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	50 %	446.262.800,00	50	100	379.107.970	84,95
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 unit	5.000.000,00	2	100	4.950.000	99,00
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	13 unit	141.482.800,00	13	100	139.831.950	98,83
17	Penyewaan Rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas	Jumlah gedung/rumah/parkiran yang disewa	3 unit	209.780.000,00	3	100	179.280.000	85,46
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara/terawat dengan baik	12 unit	90.000.000,00	12	100	55.046.020	61,16

C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	65 %	275.612.739,00	64,19	98,75	271.348.264	98,45
19	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	40 orang	149.182.473,00	39	97,10	144.994.998	97,19
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	310 orang	126.430.266,00	310	100	126.353.266	99,94
D	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase SDM Aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensi	74 %	343.486.000,00	72,86	98,46	310.798.423	90,48
23	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Jumlah Penyelenggaraan pendidikan yang dipantau dan dievaluasi	65 orang	63.700.000,00	63	96,92	45.930.864	72,10
24	Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan	Jumlah calon dan peserta didik sekolah kedinasan yang mendapatkan bantuan	33 orang	279.786.000,00	33	100	264.867.559	94,67
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase terpenuhinya JPT, jabatan administrasi dan Jabatan Fungsional	85%	6.675.490.000,00	90,28	106,22	4.380.642.516	65,62
25	Penyusunan Rencana Pembinaan dan pengembangan Karier	Jumlah SKPD yang struktur organisasinya terisi	41 SKPD	1.565.000.000,00	41	100	1.327.975.277	84,85
26	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah Peserta yang lulus sebagai CPNS dan PPPK	500 orang	2.296.000.000,00	444	88,80	1.978.244.299	86,16
27	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi, dan pindah wilayah kerja	800 orang	145.900.000,00	631	78,88	139.955.690	95,93
28	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar dan izin belajar	Jumlah peserta tugas belajar dan Ijin belajar di lingkungan Pemprov. Kaltara	40 orang	1.630.500.000,00	30	75	442.778.152	27,16
29	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah ASN yang menerima tanda kehormatan (Staya Lencana) dan penghargaan bagi ONS yang berprestasi dan inovatif di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	100 orang	58.840.000,00	340	340	37.951.985	64,50
30	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	20 orang	256.740.000,00	20	100	82.094.128	31,98

31	Tes Kesehatan , Narkoba dan Donor Darah	Jumlah Calon ASN dan ASN di lingkungan Pemprov. Kaltara yang mengikuti tes kesehatan narkoba dan donor darah	191 orang	39.400.000,00	191	100	14.548.600	36,93
32	Ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang lulus ujian Penyesuaian Ijazah	30 orang	286.360.000,00	18	60	146.065.652	51,01
33	Pembinaan dan evaluasi SKP	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan dan evaluasi SKP	41 SKPD	132.300.000,00	41	100	69.474.400	52,51
34	Pengambilan sumpah janji PNS	Jumlah ASN yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS	149 orang	54.300.000,00	149	100	47.622.000	87,70
35	Ujian Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas	70 orang	210.150.000,00	18	25,71	93.932.333	44,70
F	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP	90 %	1.542.304.400,00	92	101,98	1.174.269.948	76,14
36	Pembangunan dan pengembangan SIMPEG	Jumlah aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang dikelola	41 SKPD	440.756.000,00	41	100	347.892.881	78,93
37	Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Jumlah ASN yang membuat KARPEG, KARIS dan KARSU	166 orang	89.600.000,00	166	100	75.696.403	84,48
38	Penataan sistem aplikasi Kepegawaian (SAPK)	Jumlah Pengelola SAPK yang kompeten	30 orang	292.620.000,00	29	96,66	207.259.494	70,83
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate	4 Dokumen		4	100		
39	Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi	Jumlah SKPD dengan sistem Absensi Online yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	41 SKPD	400.648.400,00	41	100	291.790.437	72,83
40	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Jumlah usul kenaikan pangkat yang terproses	50 PNS	100.200.000,00	40	80	83.250.480	83,08
41	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah PNS yang diproses SK Pensiunnya	500 PNS	113.480.000,00	696	139,20	108.833.453	95,91
42	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah PNS mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	120 orang	105.000.000,00	120	100	59.546.800	56,71

G	Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP	74 %	1.034.178.000,00	47,78	64,57	571.259.537	57,75
43	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ASN	Jumlah PNS yang mengikuti STQ dan MTQ ASN	60 orang	773.000.000,00	14	23,33	480.612.777	62,18
44	Pelaksanaan rapat kerja KORPRI	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kerja KORPRI	23 orang	134.538.000,00	2		13.365.360	14,93
45	Sosialisasi bantuan hukum KORPRI	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate	60 orang	126.640.000,00	60	100	77.281.400	61,02
JUMLAH				12.870.563.939,00			9.214.818.580	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari seluruh program pada Tahun 2018 sebesar 95,50 %. Rata rata capaian program tertinggi adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan capaian program sebesar 106,22 % selanjutnya Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebesar 101,98 % dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100 %. Sedangkan untuk yang terendah adalah Program Pembinaan ,fasilitasi dan penguatan kelembagaan KORPRI yaitu sebesar 64,57 %.

Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan tertinggi adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 98,45% selanjutnya Program Pendidikan Kedinasan sebesar 90,48% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,95%. Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan yang terendah adalah Program Pembinaan ,fasilitasi dan penguatan kelembagaan KORPRI yaitu sebesar 57, 75%.

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Aset BKD masih perlu ditingkatkan dari segi perencanaan kebutuhan sampai dengan pengelolaannya. Oleh karena itu perlu peningkatan kompetensi pengelola aset di BKD.
2. Perencanaan program dan kegiatan sebaiknya disusun lebih terstruktur mengikuti kebutuhan pengelolaan Manajemen ASN yang sedang berkembang. Oleh karena itu koordinasi dan konsultasi antar bidang harus lebih ditingkatkan guna memperoleh masukan terkait perencanaan program dan kegiatan.
3. Belum tersusunnya pemetaan kompetensi ASN di Pemprov. Kaltara.
4. Penataan Jabatan belum sepenuhnya berdasarkan Sistem Merit.
5. Penegakan disiplin ASN perlu sosialisasi terus-menerus, sehingga Perangkat Daerah memahami pembinaan disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010.
6. Manajemen data kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mendapatkan informasi yang update
7. Sistem Informasi manajemen kepegawaian yang telah terbangun harus dipelihara dan diimplementasikan secara konsisten.

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM/KEGIATAN

Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.05.02

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
1.	<p>Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 111 Tahun 2017 Tentang Tambah Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada CPNS, PNS, dan PNS Dipekerjakan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018</p> <p>Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Tanjung Selor Tanggal 23 Maret 2018. Narasumber Sosialisasi berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Kebijakan Pemberian TPP Tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPP sebagai salah satu aspek dalam sistem pembinaan pegawai. 2. TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan kehadiran kerja. 3. TPP merupakan penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ASN secara optimal. 		<p>Pembukaan Acara oleh Kepala BKD Prov. Kaltara Muhamad Ishak, S.E., MM didampingi oleh Kabid Pengembangan dan Informasi Pegawai BKD Prov. Kaltara Andi Amriampa, S.Sos., M.Si</p> <p>Narasumber Taufik Hidayat, STP., M.Si Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Prov. Kaltara Dedy Irawan, S.E, Sekretaris Inspektorat Prov. Kaltara dan Andi Amriampa, S.Sos., M.Si Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai</p> <p>Penyampaian Materi Pergub no 111 tentang TPP di Tanjung Selor Oleh Andi Amriampa, S.Sos., M.Si Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai</p>



Penyampaian Materi Oleh Bapak Taufik Hidayat, STP., M.Si Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Prov. Kaltara



Antusias Peserta Kegiatan Sosialisasi Pergub no 111 tentang TPP di Tanjung selor



Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian di RSUD Tarakan Tanggal 10 April 2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
2.	<p>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Tanjung Selor, 15 Mei 2018</p> <p>Kegiatan Rapat Koordinasi e-Kinerja membahas materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. 4. Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara. <p>Narasumber Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Harun Arsyad, SH., MH, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. 2. Kukuh Heru Yanto, SH., MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian. 		<p>Sambutan dan pembukaan acara oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M</p> <p>Narasumber Drs. Harun Arsyad, SH., MH Kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Kepegawaian di BKN dan Kukuh Heru Yanto, SH., MH Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian BKN dan Andi Amriampa, S.Sos., M.Si Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai Provinsi Kalimantan Utara sebagai Moderator.</p>



Sesi Tanya Jawab dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian



Antusias peserta Sosialisasi Peraturan Perundang – Undang Bidang Kepegawaian Tentang Kode Etik dan Tata Cara Pemberian Cuti



Program : Pendidikan Kedinasan
 Kegiatan : Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.15.10

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
3.	<p>Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Pemprov. Kaltara Tahun 2018</p> <p>) Tahun 2018 Pendaftaran Capra IPDN Sebanyak 351 Orang, kuota yang disediakan 32 Orang dan yang lulus untuk mengikuti tes Pantukhir 34 Orang, terdiri dari Laki-laki sebanyak 23 Orang dan Perempuan 11 Orang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tarakan : 13 Orang (L = 9) (P = 4) 2. Kab. Bulungan : 12 Orang (L = 8) (P = 4) 3. Kab. Nunukan : 6 Orang (L = 4) (P = 2) 4. Kab. Malinau : 2 Orang (L = 1) (P = 1) 5. Kab. Tana Tidung : 1 Orang (L = 1) (P = 0) <p>) Jadwal pelaksanaan tes Pantukhir di kampus IPDN Jatinangor dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2018</p> <p>Untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas dan mendukung proses seleksi yang jujur dan transparan, tahapan dan hasil tes disampaikan kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online secara adil dan akuntabel.</p>		<p>Suasana Psikotes Calon Praja IPDN 2018</p>

Seluruh proses penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan oleh panitia pusat dan Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan pemantauan kegiatan dan fasilitasi test.

Pendaftaran awal para Peserta Seleksi Calon Praja IPDN dilaksanakan melalui website Kemendiknas-RB <http://panselnas.id>, dimana calon peserta mendapatkan nomor pendaftaran dan selanjutnya menyampaikan kelengkapan berkas dengan mengupload dokumen syarat pendaftaran ke website <http://spcp.ipdn.ac.id>.

Selanjutnya dilakukan Tes Kompetensi Dasar yang dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Tes (CAT) bertempat di Laboratorium CAT Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan tahapan test selanjutnya yaitu Tes Kesehatan dan Tes Psikotest yang kemudian peserta yang lolos seleksi akan dikirim untuk mengikuti Tes Pantukhir. Mengenai jadwal pelaksanaan tes berikutnya, akan diumumkan melalui portal website <http://spcp.ipdn.ac.id>.



Suasana Tes Kesehatan Calon Praja IPDN Tahun 2018



Sambutan Gubernur Ir. H. Irianto Lambrie dalam Kegiatan Pelepasan Calon Praja IPDN Pemrov. Kaltara Tahun 2018



Tamu Undangan Serta Peserta Calon Praja IPDN Tahun 2018



Sesi Foto Bersama Kepala BKD Muhamad Ishak, SE., MM dan Peserta Calon Praja IPDN Tahun 2018

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.01

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
4.	<p>Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2018 Tanggal 21 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun atas nama Drs. H. Badrun, M.Si. NIP.196006171985011001. Jabatan Terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjadi lowong/kosong.</p> <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang lowong</p>		<p>Rapat Persiapan Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya</p> <p>Penerimaan Berkas di Sekretariat Pantia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya</p>

Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

Berdasarkan Nomor 800.08/476.1/2.1-BKD Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Tim Narasumber/Praktisi/Profesional Uji Kompetensi melalui Assesment Test dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, maka Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi melalui Metode Assesment Test Terhadap 16 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada tanggal 11-13 Juli 2018 yang bertempat di Assesment Center PKP2A I LAN Jatinangor.

Dikarenakan terjadinya pergeseran jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi Melalui Asesment Test yang semula dijadwalkan Pada Tanggal 2-7 Juli 2018 menjadi tanggal 11-13 Juli 2018 maka Panitia Seleksi melakukan penyesuaian tahapan dan jadwal Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Pengumuman Nomor 12/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 20 Juli 2018



Rapat Tim Sekretariat Pansel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



Rapat Verifikasi Berkas Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya oleh Tim Panitia Seleksi

Berdasarkan Hasil Rapat Penentuan Hasil Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test pada tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Kepala LAN, Gedung B, Lt.2 Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 8 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dinyatakan Lulus Assessment Test dan telah diumumkan melalui Pengumuman dengan Nomor 13/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 30 Juli 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/284.2/BKD Tanggal 23 April 2018 tentang Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, maka Tim Panitia Seleksi melaksanakan Uji Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara di Ruang Pertemuan Swissbel Hotel Tarakan pada tanggal 7-8 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian assessment, Uji Penulisan Makalah, presentasi dan wawancara bagi peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Tim Panitia Seleksi



Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test 1 dan Test 2

Mengumumkan Hasil Seleksi Akhir Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Nomor 17/Pansel-Madya/Kaltara/2018 Tanggal 10 Agustus 2018



Rapat Penentuan Hasil Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test



Uji Presentasi dan Wawancara

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
5.	<p>Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 821/452/BKD Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara an. Risdianto, S.Pi, M.Si. NIP.197205091997031008, maka Jabatan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjadi lowong/kosong.</p> <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang lowong</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :</p> <p>Berdasarkan Nomor 800.08/609.1/2-BKD Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Tim Narasumber/Praktisi/Profesional Uji Kompetensi melalui Assessment Test dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan emerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun</p>		<p>Rapat Persiapan Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Rapat Verifikasi Berkas Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh Tim Panitia Seleksi</p>

Anggaran 2018, maka Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test Terhadap 10 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 27-28 Agustus 2018 yang bertempat di Assessment Center PKP2A I LAN Jatinangor.

Berdasarkan Hasil Rapat Penentuan Hasil Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 7 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan Lulus Assessment Test dan telah diumumkan melalui Pengumuman dengan Nomor 16/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 12 September 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/284.1/BKD Tanggal 23 April 2018 tentang

Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, maka Tim Panitia Seleksi melaksanakan Uji Penulisan Makalah di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 18 September 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/700.1/BKD Tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran



Foto bersama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kepala LAN RI pada Asessment Test



Rapat Penentuan Hasil Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Test

2018, maka Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Uji Presentasi dan Wawancara Di Ruang Pertemuan Swisbell Hotel Tarakan pada tanggal 25 September 2018

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian assessment, Uji Penulisan Makalah, presentasi dan wawancara bagi peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Tim Panitia Seleksi Mengumumkan Hasil Seleksi Tahap Akhir Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Nomor 23/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 25 September 2018



Uji Penulisan Makalah Calon JPT
Pratama Kepala Biro
Pembangunan

Uji Presentasi dan Wawancara
Calon JPT Pratama Kepala Biro
Pembangunan

Pengambilan Sumpah Janji
Jabatan dan Pelantikan Kepala
Biro Pembangunan

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
6.	<p>Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara yang lowong/ kosong melalui mekanisme JOB FIT</p> <p>Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 821/719/BKD Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara an. Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si.. NIP.196812191990031011, maka Jabatan Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjadi lowong/kosong.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka efisiensi waktu dan biaya akan melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara yang lowong/ kosong melalui mekanisme JOB FIT</p> <p>Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, maka Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan kepada Calon pejabat Pimpinan Tinggi</p>		<p>Uji Presentasi dan Wawancara Saudara H. Abdul Jalil, S.Sos,M.AP</p> <p>Uji Presentasi dan Wawancara Saudara Drs. Hari Kuntjoro, M.Si</p>

Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti Uji Kompetensi dan Wawancara oleh Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/855/BKD Tanggal 12 November 2018 Perihal Uji Kompetensi dan Wawancara

Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kalimantan Utara telah Membuat Undangan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan wawancara kepada Calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara dengan Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor 32/Pansel-Pratama/Kaltara/2018 Tanggal 6 Desember 2018 Perihal Uji Kompetensi dan Wawancara

Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Uji Presentasi dan Wawancara Jabatan Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Di Ruang



Uji Presentasi dan Wawancara Saudara Sumaji, S.Sos, M.Hum



Uji Presentasi dan Wawancara Saudara Taufik Hidayat, STP, M.Si

Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 11 Desember 2018

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/700.1/BKD Tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, maka Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan



Rapat Tim Panitia Seleksi terkait Rekapitulasi Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kaltara:

-) *Ir. H. Syaiful Herman, M.AP*
(Pj. Sekretaris Daerah)
-) *Alexander Rubi Satyoadi*
(Kepala BPKP Prov. Kaltara)
-) *Dr. Mariman Darto, M.Si,*
(Kepala PKP2A III LAN)
-) *Fredrick Elia Gugkang*
(Profesional)

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Seleksi Penerimaan Calon ASN
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.17.02

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
7.	<p>Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018</p> <p>Penerimaan CPNS Pemrov Kaltara Tahun 2018 diumumkan tanggal 19 September 2018 berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.08/692/2.1-BKD tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan dengan pendaftaran online pada (https://sscn.bkn.go.id) dan penyerahan berkas yang dilaksanakan pada tanggal 26 September s.d 15 Oktober 2018. Penyerahan berkas CPNS wajib diserahkan langsung oleh pelamar dan akan langsung diverifikasi oleh verifikator berkas CPNS yang berada di Kantor BKD Gedung Gadis II Lt. 2 Tanjung Selor. Setelah berkas selesai diverifikasi secara faktual akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas secara online. Dari seleksi berkas, pelamar yang lulus verifikasi (memenuhi syarat) sebanyak 4.754 peserta berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.08/700/2.1-BKD.</p> <p>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung dari tanggal 1 s.d 10 November 2018 di Lab CAT Pemprov Kaltara, setiap harinya dibagi menjadi 5 sesi terkecuali hari Jum'at akan dilaksanakan 4 sesi. Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti Seleksi</p>		<p>Suasana Penyerahan berkas pelamar yang langsung diverifikasi oleh verifikator berkas CPNS yang berada di Kantor BKD Gedung Gadis II Lt. 2 Tanjung Selor</p> <p>Pembukaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) oleh Kepala BKD Muhamad Ishak, SE., MM bersama Wakil Gubernur H. Udin Hianggio</p>

Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan pengumuman Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 810/969/2.1-BKD tanggal 3 Desember 2018, dari pengumuman tersebut terdapat 911 peserta seleksi SKB yang berlangsung tanggal 7 s.d 9 Desember 2018.



Registrasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)



Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) di Lab CAT Pemprov Kaltara



Penyerahan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kepada Perwakilan BKN

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Penempatan PNS
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.17.03

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
8.	<p>Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator, Pengawas Prov. Kaltara Sekaligus Pemberian Penghargaan Satyalancana X, XX dan XXX Tanggal 29 Januari 2018</p> <p>Pelantikan dan Pemberian Satyalancana dilaksanakan di ruang serbaguna Gedung Gabungan Dinas II, Jumlah Pejabat yang dilantik berjumlah 254 orang, terdiri atas pejabat administrasi 84 orang dan pejabat pengawas 171 orang, Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821/49/2-BKD.</p> <p>Usai Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator dan Pengawas dilanjutkan dengan pemberian Satyalancana kepada ASN yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun. 203 ASN mendapatkan Satyalancana yakni, 30 tahun sebanyak 35 ASN, 20 Tahun 27 ASN dan 10 Tahun sebanyak 151 ASN.</p>		<p>Sambutan dan pembukaan acara oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M</p> <p>Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p>



Pemberian Satyalancana kepada ASN yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun



Peserta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.





Penyerahan Berita Acara Sumpah Jabatan



Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Sekda, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, di Gedung Serbaguna Gadis II Lt.2 Tanjung Selor, 4 Juli 2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
10.	<p>Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 1 Oktober 2018</p> <p>Gubernur Kalimantan Utara Melantik Pejabat Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Administrator di ruang serba guna gedung Gadis II. Adapun Pejabat yang dilantik adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syaiful Herman, M.AP sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 2. DT Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara; 3. Sunardi, ST. MT sebagai Kepala Biro Pembangunan Setprov. Kalimantan Utara; 4. Dr. DT Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. 		<p>Sambutan dan pembukaan acara oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M</p> <p>Pembacaan Sumpah Jabatan dipimpin oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M dan diikuti oleh peserta</p>



Penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan



Penyerahan SK Praja IPDN



Peserta Pelantikan Sumpah Janji Penjabat Sekda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator digedung gadis lantai I di Tanjung Selor

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Ijin Belajar
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.06

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR																																												
11.	<p>Kegiatan Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar Adapun data Tugas Belajar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :</p> <p>JUMLAH PESERTA TUGAS BELAJAR TAHUN 2018</p> <table border="1" data-bbox="303 620 1142 896"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TUGAS BELAJAR</th> <th>JUMLAH</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>S-I</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S-II</td> <td>5</td> <td>2 APBD, 3 APBN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SPECIALIS</td> <td>12</td> <td>5 APBD, 7 APBN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td></td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> <p>JUMLAH PESERTA IJIN BELAJAR TAHUN 2018</p> <table border="1" data-bbox="303 966 1142 1226"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>IJIN BELAJAR</th> <th>JUMLAH</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D-III</td> <td>14</td> <td>Program RPL Tenaga Kesehatan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S-I</td> <td>33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S-II</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>S-III</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td></td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TUGAS BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN	1	S-I	-	-	2	S-II	5	2 APBD, 3 APBN	3	SPECIALIS	12	5 APBD, 7 APBN	JUMLAH			17	NO	IJIN BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN	1	D-III	14	Program RPL Tenaga Kesehatan	2	S-I	33		3	S-II	20		4	S-III	1		JUMLAH			68		<p>Suasana Rapat Ijin Belajar Program RPL Tenaga Kesehatan</p>
NO	TUGAS BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN																																												
1	S-I	-	-																																												
2	S-II	5	2 APBD, 3 APBN																																												
3	SPECIALIS	12	5 APBD, 7 APBN																																												
JUMLAH			17																																												
NO	IJIN BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN																																												
1	D-III	14	Program RPL Tenaga Kesehatan																																												
2	S-I	33																																													
3	S-II	20																																													
4	S-III	1																																													
JUMLAH			68																																												



Suasana Rapat Seleksi Tubel
dengan BKD Kaltim





Kegiatan Tes Kesehatan dan Donor Darah oleh BKD Prov. Kaltara dan Dinas Kesehatan Dalam Rangka Memperingati HUT Kaltara yang Ke 5

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.17.20 dan 4.05.4.05.01.01.17.33

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
13.	<p>Kegiatan Ujian Dinas(UDIN) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Tanggal 15-16 Oktober 2018</p> <p>Tujuan diselenggarakan Ujian Dinas adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Tujuan daripada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap PNS yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan Ijazah yang dimilikinya.</p> <p>Total Jumlah Pendaftar 63 Orang UDIN : 34 Orang UPI : 29 Orang</p>		<p>Suasana Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah menggunakan tes CAT di tanjung selor 15 Oktober 2018</p>

Jumlah Setelah diverifikasi 47 Orang

UDIN : 24 Orang

UPI : 23 Orang

Jumlah Peserta hadir Tes CAT 37 Orang, tidak hadir 10 orang

Ujian Dinas Tk. I : 15 Orang

Ujian Dinas TK. II : 4 Orang

Ujian PI (SMA) : 3 Orang

Ujian PI (S-1) : 15 Orang

Jumlah Peserta hadir Tes Wawancara 36 Orang, tidak hadir 1 orang

Jumlah peserta yang lulus ujian sebagai berikut :

Ujian Dinas Tk.I sebanyak 14 Orang

Ujian Dinas Tk. II sebanyak 4 Orang

Ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 18 Orang

Jumlah peserta yang tidak lulus

Ujian Dinas Tk.I sebanyak 2 Orang

Dengan keterangan 1 peserta tidak mengikuti tes CAT dan 1 peserta tidak mengikuti tes wawancara.



Suasana Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah di Hotel Crown Tanjung Selor Tanggal 16 Oktober 2018

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi SKP
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.27

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
14.	<p>KEGIATAN MONITORING IMPLEMENTASI DAN EVALUASI e-SKP</p> <p>Badan Kepegawaian adalah salah satu satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai peran dalam tercapainya Visi Misi daerah yang telah dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam mewujudkan Visi Misi tersebut maka disusunlah RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD, maka dalam memastikan rencana pembangunan daerah dan implementasi program serta kegiatan setiap SKPD perlu untuk didukung/didisbusikannya setiap tugas – tugas sehingga tiap – tiap pegawai negeri sipil focus pada kegiatan, tugas jabatan masing – masing. Dalam hal mengoptimalkan kinerja – kinerja dan pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut maka perlu dibuat perencanaan dan kontrak kerja masing – masing pegawai negeri sipil yang tertuang dalam bagian dari lembar SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), selain sebagai bentuk perencanaan kinerja selama 1 tahun, SKP juga sebagai salah satu alat untuk memberikan penilaian</p>		<p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bulungan atau Kota Tanjung Selor</p>

prestasi kerja pegawai atau lebih friendly disebut raportnya pegawai negeri sipil. Semua dilakukan dengan maksud mensingkronkan seluruh rencana pembangunan daerah segingga terbaca dengan jelas dan realistis tahapannya.

Sesuai dengan amanat undang – undang dan peraturan pemerintah beserta turunannya, sasaran kinerja pegawai negeri sipil harus mulai diisi pada awal tahun dan diberikan penilaiannya pada akhir tahun tiap periodenya, untuk menunjang penyusunan SKP tersebut telah disipkan aplikasi yang mempermudah setiap pegawai dalam mengisinya yaitu aplikasi e-SKP. Dalam hal memastikan penyusunan SKP yang baik, benar dan tepat waktu, Badan Kepegawaian Daerah melalui Kasubbid Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi e-SKP dalam penyusunan SKP.



Monitoring dan Evaluasi di Kota Tarakan



Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Nunukan



Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Malinau

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 Kegiatan : Pengambilan Sumpah Janji PNS
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.32

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
15.	<p>Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Formasi Guru Garis Depan (GGD) tahun 2017 dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 29 Agustus 2018</p> <p>Sebanyak 167 CPNS formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2017 resmi mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie di ruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov. Kaltara. Acara tersebut dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji 149 Pegawai Negeri Sipil. Pengambilan sumpah/janji merupakan hal yang sangat penting karena merupakan suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Ikrar ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau institusi saja, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bagi PNS yang telah diambil sumpahnya agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. PNS diharuskan untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, memegang teguh integritas, independensi dan profesionalitas sebagai PNS.</p>		<p>Pembukaan acara oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M</p> <p>Sambutan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Muhamad Ishak, S.E., MM</p>



Peserta Kegiatan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi GGD 2017 dan Pengambilan Sumpah Jabatan



Penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi GGD 2017



Sesi Foto Bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M dan Peserta Kegiatan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi GGD 2017 dan Pengambilan Sumpah Janji

Program : Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.01

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
16.	<p>Sosialisasi e-Kinerja Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Tanjung Selor, 7 Mei 2018</p> <p>Guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengaplikasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 111 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja, maka setiap ASN diwajibkan mengisi laporan harian e-Kinerja. Aplikasi e-Kerja Berbasis Web dan dapat diakses melalui simpeg.kaltaraprov.go.id dengan login menggunakan NIP masing-masing ASN.</p>		<p>Suasana Sosialisasi e-Kinerja dengan seluruh jajaran pejabat Eselon II</p>



Antusias Peserta Rapat Koordinasi E-Kinerja di Gedung Serbaguna Gadis Lt.1 Tanjung Selor



Sesi Tanya Jawab dalam Kegiatan Rapat Koordinasi E-Kinerja di Gedung Serbaguna Gadis Lt.1 Tanjung Selor

dengan peraturan yang berlaku. Materi kedua Pembinaan dan Evaluasi SKP dengan Narasumber Bapak Andi Hikmal, S.Sos dan Ibu Mellinda Nencytarani, S.Kom, membawakan materi :

-) Dasar Penilaian Prestasi Kerja : Inpres No 3 Tahun 2003;
-) PP No 46 Tahun 2011, Perka BKN No. 1 Tahun 2013, SE Menpan RB No 2 Tahun 2013;
-) Hasil Evaluasi SKPD Prov. Kaltara Tahun 2017;
-) Sistem penilaian prestasi kinerja milik BKN.

Materi ketiga rekon data dan Evaluasi SIMPEG, materi ketiga ini juga diikuti oleh bagian data BKPSDM/BKPP Kabupaten Kota, Narasumber Bapak Andi Hikmal, S.Sos dan Ibu Mellinda Nencytarani, S.Kom membawakan materi Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG. Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG ini dilakukan mengingat validasi data yang merupakan hal penting dalam pelayanan kepegawaian.



Suasana Kegiatan Rekon Data dan Evaluasi SIMPEG



Sesi Foto Bersama Kegiatan Rekon Data dan Evaluasi SIMPEG

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
19.	<p>Sosialisasi si Detektif ASN dilingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se wilayah Kota Tarakan</p> <p>Pembangunan aplikasi eHukdis yang kemudian dikembangkan menjadi siDetektif ASN menjadi materi proyek perubahan pada Pendidikan Pelatihan Tingkat 3 di PKP2A III Lan Samarinda. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kota Tarakan dan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.</p> <p>Sosialisasi di Kota Tarakan difasilitasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Tarakan bertempat di Ruang Pertemuan SMKN 1 Kota Tarakan yang diselenggarakan pada Hari Senin, 5 November 2018 memulai sosialisasi dan ujicoba pertama sistem deteksi dini pembinaan disiplin ASN Kaltara (si Detektif ASN) bersama Kepala Cabang Dikbud, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha SMA/SMK/SLB se Kota Tarakan</p>		<p>Pembukaan Kegiatan Sosialisasi si Detektif ASN dilingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se wilayah Kota Tarakan oleh Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Prov. Kaltara Andi Amriampa, S.Sos, M.Si</p> <p>Sesi foto bersama kegiatan Sosialisasi si Detektif ASN</p>

Program : Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 Kegiatan : Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), KARSU, dan KARIS
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.02

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
20.	Sosialisasi Sistem Pengusulan KARPEG, KARIS dan Karsu Online (SI-Apek) serta Verifikasi dan Pencetakan Karpeg, Karis dan Karsu oleh Kantor Regional VIII BKN Tanjung Selor, 23 Juli 2018		<p>Sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala BKD Prof. Kaltara Muhamad Ishak, SE., MM, Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai Andi Amriampa, S.Sos., M.Si, Kabid Rencana dan Pengembangan Pegawai Waluya Sejati, SE.</p> <p>Suasana Sosialisasi Sistem Pengusulan KARPEG, KARIS dan Karsu Online (SI-Apek) serta Verifikasi dan Pencetakan Karpeg, Karis dan Karsu oleh Kantor Regional VIII BKN</p>



Proses Pembuatan KARPEG, KARIS dan Karsu Online (SI-Apek) serta Verifikasi dan Pencetakan Karpeg, Karis dan Karsu oleh Kantor Regional VIII BKN

Program : Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 Kegiatan : Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.03

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
21.	<p>Kegiatan Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Ciptakan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian, Jakarta 19-20 April 2018</p> <p>Kegiatan Penataan SAPK merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh BKD Prov Kaltara untuk seluruh admin dan pengguna aplikasi SAPK di Prov Kaltara, guna menciptakan pelayanan prima bidang kepegawaian. Kegiatan SAPK Tahun 2018 dilaksanakan di kantor BKN Jakarta.</p>		<p>Sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Muhamad Ishak, SE., MM</p> <p>Narasumber Heni Sriwahyuni, S.Kom., MTI Kepala Sub Direktorat Pengolahan Data dan Sabar Perlindungan Sormin, S.Kom., MMSI Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian</p>



Penyampaian Materi oleh Narasumber Astried Rachmadina, S.Kom., MA Kepala Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian PNS



Pemberian Tanda Peserta oleh Bapak Sabar Perlindungan Sormin, S.Kom., MMSI Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian



Antusias peserta Kegiatan Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Ciptakan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian

Program : Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.16.05

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
22.	<p>Pemasangan Mesin Absen Online dan Perekaman Sidik Jari di SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas di Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Dalam rangka implementasi Sistem Informasi Absensi Online dan e-Kinerja, maka dilakukan pemasangan perangkat absensi online meliputi mesin absen dan mini server di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2018 ini pemasangan dilaksanakan untuk seluruh SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas diluar Ibu Kota Provinsi yang memiliki fasilitas jaringan internet.</p> <p>Adapun jumlah titik pemasangan setiap wilayah kerja sampai dengan Desember 2018 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kerja di Ibukota Provinsi dan Kabupaten Bulungan terdapat 49 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan di Kantor OPD, SMA/SMK/SLB, Kantor UPT Dinas termasuk SMA/SMK dan UPT Dinas di Pulau Bunyu. 2. Wilayah kerja di Kota Tarakan terdapat 17 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada RSUD Tarakan, SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas Provinsi. 		<p>Proses Pemasangan Mesin Absensi Online di SMA/SMK/SLB</p>

3. Wilayah kerja di Kabupaten Nunukan terdapat 7 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK/SLB dan UPT Dinas Provinsi.
4. Wilayah kerja di Kabupaten Malinau terdapat 9 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK/SLB dan UPT Dinas Provinsi.
5. Wilayah kerja di Kabupaten Tana Tidung terdapat 4 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK dan UPT Dinas Provinsi.
6. Wilayah kerja Badan Penghubung Jakarta terdapat 2 titik pemasangan dan 1 titik pemasangan di Badan Penghubung Balikpapan.



Proses Perekaman Sidik Jari Guru-Guru SMA/SMK/SLB



Antusias Peserta Raker Kepegawian
Se Provinsi Kaltara tanggal 24
September 2018 di gedung gadis II
lantai I Tanjung Selor



Sesi Foto Bersama Kepala BKD Prov.
Kaltara Muhamad Ishak, S.E., MM,
Wakil Gubernur Prov. Kaltara H. Udin
Hianggio dan Narasumber

Program : Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI
 Kegiatan : Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ASN
 Kode Rekening : 4.05.4.05.01.01.18.07

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
24.	<p>Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI IV Tingkat Nasional di Jakarta</p> <p>KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mengikuti MTQ KORPRI IV Tingkat Nasional di Jakarta, KORPRI Prov. Kaltara mengirimkan 14 peserta untuk mengikuti cabang-cabang lomba dengan didampingi pelatih dan official. Sebelum bertanding peserta MTQ mengikuti Training Center (TC) yang di laksanakan di wisma Syahida Inn, disini peserta dibimbing dan dilatih guna pemantapan mater</p> <p>Pelaksanaan MTQ KORPRI IV berlangsung dari tanggal 10 s.d 18 November 2018 diikuti kafilah dari 34 provinsi dan 76 kementerian/lembaga. Dalam kegiatan tersebut KORPRI Provinsi Kalimantan Utara meraih Juara II dalam Cabang Khath al-Qur'an, Gol. Kaligrafi Kontemporer (Putra) dan Juara Harapan II Golongan Da'l dan Da'iyah (Putra).</p>		<p>Acara Pelepasan Kafilah MTQ Prov. Kaltara</p> <p>Pembukaan dan Arahan Kegiatan TC (Training Center) MTQ</p>



Sesi Foto Bersama Acara Pelepasan
Kafilah MTQ Prov. Kaltara



Pembukaan MTQ IV KORPRI Tingkat
Nasional di Gedung Pencak Silat
Taman Mini Indonesia Indah Jakarta



Peserta MTQ IV KORPRI



Malam Ta'aruf dan Pelantikan Dewan Hakim MTQ



Penutupan MTQ dan Penyerahan Hadiah



Pemaparan Materi dari Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai Andi Amriampa, S.Sos, M.Si dan Ibu Setyoningsih



Antusias Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara



Sesi Foto Bersama Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Program : -
Kegiatan : Kegiatan Lain-Lain
Kode Rekening : -

26. Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 19 Maret 2018

Pelaksanaan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS diselenggarakan di Ruang Serbaguna Gedung Gadis II. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menghadiri acara Penyerahan SK Pengangkatan 423 CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Utara Ir. H. Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, para Bupati dan Walikota di Provinsi Kaltara serta Kepala OPD.



Pembukaan acara oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M, Wakil Gubernur H. Udin Hianggio dan Menpan RB Asman Abnur



Menpan RB, Kepala LAN, Kepala BKN, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Menghadiri acara Penyerahan SK CPNS Kaltara Formasi umum tahun 2017

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
		  	<p>Penyampaian Pengarahan oleh Men PAN-RB Asman Abnur kepada seluruh CPNS Prov. Kaltara Formasi Umum</p> <p>Penyerahan SK CPNS oleh Men PAN-RB Asman Abnur kepada CPNS Prov. Kaltara Formasi Umum</p> <p>Sesi Foto Bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M, Menpan RB dan Peserta CPNS</p>

27. Kunjungan Kerja BKD Pemeriantah Provinsi Jawa Barat ke BKD Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 April 2018 di Tanjung Selor

Kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melakukan konsultasi teknis, terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS di lingkup Pemprov Kaltara. Mulai dari seleksi kompetensi dasar (SKD) hingga seleksi kompetensi bidang (SKB). Kedatangan Pemprov Jabar disambut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Drs. H. Zainuddin HZ M.Si.



Sambutan dari Perwakilan Rombongan BKD Se Provinsi Jawa Barat di dampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Drs. H. Zainuddin HZ M.Si. dan Kepala BKD Bapak Muhamad Ishak, S.E, MM



Suasana Kunjungan Kerja Rombongan BKD Se Provinsi Jawa Barat



Pemberian Cenderamata Kepada Perwakilan Rombongan BKD Se Provinsi Jawa Barat yang diserahkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Drs. H. Zainuddin HZ M.Si.



Sesi Foto Bersama Rombongan BKD Se Provinsi Jawa Barat

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
28.	<p>Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI dan Peringatan HUT ke-73 PGRI Tanggal 29 Nopember 2018</p> <p>Memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI sekaligus dirangkai dengan peringatan HUT ke-73 PGRI diselenggarakan upacara di Lapangan Agathis Tanjung Selor dengan peserta upacara seluruh jajaran ASN dan para Guru, sebagai Inspektur Upacara (Irup) Dr H Irianto Lambrie. Dalam upacara tersebut disampaikan sambutan Presiden Joko Widodo dan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy.</p> <p>Upacara HUT ke-47 KORPRI dan HUT ke-73 PGRI juga dirangkaikan dengan acara tambahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian tanda jasa Satyalancana; 2. Pemberian Surat Kenaikan Pangkat Periode Oktober; Lauching Sistem Informasi GTK dan Si Detektif ASN 	 	<p>Memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI sekaligus dirangkai dengan peringatan HUT ke-73 PGRI diselenggarakan upacara sebagai Inspektur Upacara (Irup) Dr H Irianto Lambrie</p> <p>Tamu Undangan dalam rangka Memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI sekaligus dirangkai dengan peringatan HUT ke-73 PGRI</p>



Penyerahan Surat Keputusan
Kenaikan Pangkat Pegawai



Penandatanganan Dukungan
siDetektif ASN (eHUKDIS) oleh
Gubernur Kalimantan Utara Bapak
DR. H. Irianto Lambrie



Antusias Peserta dalam rangka
Memperingari Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-47 KORPRI sekaligus
dirangkai dengan peringatan HUT
ke-73 PGRI

NO.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
29.	<p>Pemetaan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana/JFU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 13-14 Desember 2018</p> <p>Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pelaksana/JFU Pemprov. Kaltara. Pemetaan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana/JFU dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, tujuan kegiatan ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur preferensi kompetensi berupa Situational Judgement; 2. Mengidentifikasi gambaran karakteristik pribadi seseorang saat melakukan pekerjaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan; 3. Memberikan rekomendasi rumpun pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadi. 		<p>Registrasi Peserta Ujian Pemetaan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana/JFU Pemprov. Kaltara</p>



Suasana Ujian Pemetaan
Kompetensi PNS Jabatan
Pelaksana/JFU Pemprov. Kaltara di
Lab. CAT

